



PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec. Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669

Nomor : 019/Seknas/Aduan & Permohonan/PB/V/2023
Lampiran : Terlampir dalam berkas
Perihal : **Aduan dan Permohonan Pemberhentian terhadap Ketua DPD Gerindra Provinsi Papua Barat Atas Nama Mohamad Lakotani.**

Kepada Yth,
Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
Bapak Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera untuk Garuda 08, Jayalah Indonesia.

Melalui surat ini, kami, Perhimpunan PASTI Indonesia yang hampir selama 12 tahun ini telah mendampingi Masyarakat Papua Barat khususnya dalam gerakan Anti Korupsi dan Kemanusiaan. Ingin menyampaikan aduan serta permohonan kepada Bapak selaku Ketua Umum Partai Gerindra yang kami ketahui cukup konsisten dan tidak berkompromi dengan perilaku Korup. Oleh karena itu, sekiranya Bapak berkenan untuk mempertimbangkan kembali **SK bernomor 06-0181/Kpts/DPP-GERINDRA/2022 yang menetapkan Mohamad Lakotani sebagai Ketua DPD Gerindra Papua Barat.**

Adapun hal ini kami sampaikan, karena pada 2019 PASTI Indonesia **secara Lembaga menjadi bagian daripada perjuangan pemenangan Prabowo-Sandi di Tanah Papua Barat dan Nasional** sebagai bentuk Perlawanan atas maraknya pembiaran Kasus Korupsi di Tanah Papua Barat yang kerap ditutupi dengan pencitraan semu. Hal ini dapat dibuktikan dengan rekam jejak dukungan nyata yang akan kami lampirkan juga dalam surat ini.

Kami, PASTI Indonesia telah menerima cukup banyak pengaduan dari Masyarakat maupun pengurus Partai Gerindra di Papua Barat terkait dengan perilaku Ketua DPD Gerindra Papua Barat, Mohamad Lakotani. Oleh karena itu menjadi wajib dan perlu untuk kami sampaikan kepada **Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo, selaku Ketua Umum Partai Gerindra serta calon Presiden Republik Indonesia** pada konstestasi Pilpres 2024.

Tindak tanduk saudara Mohamad Lakotani, bagi kami sudah tidak dapat di tolerir dan jauh daripada semangat dan Nafas Gerindra yang Bapak **Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo** tuangkan dalam **Paradoks Indonesia.**

Mengenai hal tersebut diatas, kami, PASTI Indonesia telah merangkul semua temuan tersebut, baik yang berasal dari Investigasi PASTI Indonesia di lapangan, maupun laporan dari Masyarakat hingga pengaduan dari pengurus Partai Gerindra di Papua Barat, yakni :

PASTI INDONESIA

1

WWW.PASTIINDONESIA.ORG

Email : Seknas@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org

MENGAWASI & MEMBERDAYAKAN TURUN KE BAWAH



1) Terkait dengan Kinerja selaku Ketua DPD Gerindra Papua Barat.

- Selama kepemimpinan Lakotani, sebagai kader gerindra yang menjabat sebagai wakil Gubernur Papua Barat, tidak ada Kerja Nyata bagi Masyarakat di Papua Barat maupun Kaimana sebagai tempat asalnya. Yang terjadi hanya penambahan kekayaan yang dapat di lihat dalam Lampiran LHKPN Mohamad Lakotani mulai dari awal hingga akhir Jabatan sebagai Wakil Gubernur Papua Barat (**Lampiran 1, LHKPN Mohamad Lakotani**). Bahkan kini Skandal Korupsi di Papua Barat mulai merebak ke Publik, diantaranya Korupsi KONI Papua Barat yang disinyalir juga mengalir ke Mohamad Lakotani.
- Selama perhelatan Pilpres 2019, tidak ada peran aktif maupun kerja nyata M.Lakotani untuk pemenangan Prabowo-Sandi di Papua Barat khususnya di Akar Rumput yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Hal ini dapat kami buktikan, bahwa pada perhelatan Pilpres 2019, PASTI Indonesia lah yang membentuk “Batu Api” sebagai wadah untuk menampung para simpatisan dan pendukung Prabowo-Sandi di Kabupaten Fakfak (**Lampiran 2**). Serta membawa aspirasi para pendukung ke Jakarta untuk memberikan dukungan langsung kepada Prabowo-Sandi (**Lampiran 3**), serta memberikan Doa dan Restu melalui pemasangan Topi Adat Papua maupun Songkok Merah (khas Fakfak) sebagai simbol perjuangan (**Lampiran 4**).
- Mohamad Lakotani selama menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra Papua Barat telah gagal menjalankan dan melaksanakan “amanah” Partai, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keterwakilan Kader Gerindra Papua Barat di DPRD Provinsi Papua Barat maupun di DPR RI pada Pileg 2019. Bahkan justru terjadi penurunan suara serta kepercayaan publik terhadap Partai Gerindra di Papua Barat.
- Kegagalan Kinerja M.Lakotani ini juga di suarakan oleh 10 pengurus DPC di Papua Barat (sebelum terbentuk Provinsi Papua Barat Daya), namun hal ini seolah diabaikan oleh Gerindra Pusat, yang berdampak pada pemalangan Kantor DPD Gerindra Papua Barat (**Lampiran 5**). ***Bahkan kemudian seolah berbanding terbalik, kegagalan Mohamad Lakotani ini justru seakan di apresiasi oleh DPP Gerindra dengan menerbitkan SK perpanjangan Jabatan M.Lakotani sebagai Ketua DPD Gerindra Papua Barat, yang SK-nya ditanda tangani oleh Bapak Prabowo sendiri selaku Ketua Umum Partai Gerindra.*** (**Lampiran 6, SK Perpanjangan Mohamad Lakotani**)

2) Penyalahgunaan Wewenang dan Kekuasaan Selaku Ketua DPD Gerindra Papua Barat & Wakil Gubernur Papua Barat.

- Sebagai Ketua DPD Gerindra Papua Barat, Mohamad Lakotani telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mencopot para kader setia Gerindra yang telah berjuang membesarkan Partai Gerindra, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Kaimana. Dimana Mohamad Lakotani mencopot Ketua DPC Kaimana secara sepihak dan mengantinya dengan “Wajah Baru” yakni **Drs.Muh Nasir Aiturauw**. Yang notabeneanya adalah seorang **Narapidana Tipidkor bebas bersyarat**, dimana pada saat terbitnya SK Penetapan Kepengurusan oleh DPP Gerindra, yang bersangkutan masih **berstatus masa percobaan**. (**Lampiran 7, SK**



PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec. Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669

Penetapan itu sendiri ditanda tangani oleh Bapak Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra), (**Lampiran 8**, Pemberitahuan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia terkait dengan status Drs. Muh. Nasir Aituruw)

- Mohamad Lakotani selaku Wakil Gubernur Papua Barat (saat itu) dalam investigasi PASTI Indonesia, terindikasi melakukan “Intervensi” dalam Korupsi Dinas Keluatan dan Perikanan Kabupaten Fakfak (**Lampiran 9**, Bukti Temuan Korupsi) yang dilakukan oleh Bupati Fakfak, **Untung Tamsil**. **Yang dimana kini juga menjadi telah Kader Gerindra dengan menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Fakfak** berkat “Penyelamatan” dari Mohamad Lakotani (**Lampiran 10**, Foto Untung Tamsil Hadir dalam Munas Gerindra di Hambalang dan kemudian menjadi Kader Gerindra).. Kasus Korupsi Bupati Fakfak ini sempat marak diberitakan media nasional (**Lampiran 11**, kumpulan berita terkait korupsi ini), dan menjadi perhatian serius Aparat Penegak Hukum Baik Kepolisian maupun Kejaksaan Agung (**Lampiran 12**, Surat Penyelidikan POLDA Papua Barat dan Kejaksaan Negeri Fakfak). **Bahkan Bapak Prabowo, selaku Ketua Umum Gerindra berfoto ria dengan Untung Tamsil yang berstatus terlapor skandal Korupsi Kabupaten Fakfak.** (**Lampiran 13**, Pose Untung Tamsil dengan Bapak Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra)

3) **Melakukan Pembohongan Publik, Menjebak Presiden sehingga merusak Marwah Negara yang seolah berkompromi dengan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Dalam Tindakan Ini Jelas menggambarkan Mohamad Lakotani selaku Kader Gerindra yang menjabat sebagai Wakil Gubernur dan Ketua DPD Gerindra Papua Barat tidak mendukung Pemberantasan Korupsi yang menurut Bapak Prabowo sendiri Korupsi Indonesia sudah seperti kanker Stadium IV.**

- **Menjebak Presiden, sehingga melantik WBP Tipidkor di Istana Negara, dengan memberikan Rekomendasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai Korwil di Kwarnas Gerakan Pramuka**
 - i) Melalui Gerindra dan dengan berpasangan dengan Putra Asli Arfak, Dominggus Mandacan pada Pilkada Papua Barat tahun 2017, berhasil mengantarkan seorang Mohamad Lakotani yang gagal sebagai calon Bupati Kabupaten Kaimana, menjadi seorang Wakil Gubernur Papua Barat. Usai memantapkan diri sebagai Wakil Gubernur Papua Barat dan terpilih sebagai Ketua Kwartir Daerah (KaKwarda) Gerakan Pramuka Papua Barat di Tahun yang sama, yakni 2017. (**Lampiran 14**, Berita terkait terpilihnya Mohamad Lakotani sebagai KaKwarda Gerakan Pramuka Papua Barat)
 - ii) Usai dilantik sebagai KaKwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, Mohamad Lakotani justru melakukan tipu muslihat, dengan memberikan rekomendasi Terpidana Tindak Pidana Korupsi Teluk Wondama, **Drs Wim F Fimbay MM**, yang berstatus Warga Binaan Pemasyarakatan kepada Panitia Seleksi Kwarnas Pramuka sebagai Kandidat Korwil IV Gerakan Pramuka Nasional. (**Lampiran 15**, Informasi terkait status Warga Binaan Pemasyarakatan Wim Fimbay)
 - iii) Karena tipu muslihat tersebut yang di sinyalir syarat kepentingan dan berindikasi “suap”, akhirnya atas rekomendasi tersebut, Pada tanggal 27 Desember 2018,



Presiden Joko Widodo melantik Kepengurusan Kwarnas Gerakan Pramuka. Diantaranya terdapat WBP atas nama **Drs Wim F Fimbay MM**, sebagai Korwil IV dalam Kepengurusan Kwarnas Gerakan Pramuka Periode 2018-2023. (Lampiran 16, Foto Pelantikan di Istana Negara). *Hal ini tentu sangat mencoreng Marwah Presiden dan Hukum Indonesia yang seolah dapat di mainkan dengan kekuasaan dan jabatan.*

- iv) Seorang WBP yang seharusnya menjalankan "**hukuman**" di dalam lapas, serta dapat leluasa menerima "**Anugerah Jabat Tangan Presiden**", berkat Mohamad Lakotani. Dan tidak sampai disana saja. 2019, masih dalam status sebagai WBP, **Drs Wim F Fimbay MM** dapat menjabat sebagai Ketua Gerakan Pramuka Kabupaten Teluk Bintuni (KaKwarcab) dan mendapatkan pengesahan dari Mohamad Lakotani selaku KaKawarda Gerakan Pramuka Papua Barat. (Lampiran 17, berita terkait terpilihnya **Drs Wim F Fimbay MM** sebagai KaKwarcab Kabupaten Teluk Bintuni)

Sebagai seorang Kader Gerindra yang diamanatkan untuk menjadi seorang Wakil Gubernur, seharusnya menjadi contoh dan suri tauladan, mengingat wilayah Papua "**menjadi Sorotan karena Rentan dengan Konflik, marak terjadinya tindak pidana Korupsi hingga masalah ketimpangan sosial dan Hukum**", namun yang di pertontonkan oleh Mohamad Lakotani adalah bentuk **penghianatan** terhadap "**Penegakkan Hukum**" dan "**Pelecehan terhadap Presiden sebagai Simbol Negara, seolah Presiden mudah dibodohi dan berkompromi dengan terpidana tindak pidana korupsi**". Tentu Gerindra sebagai bagian dari Pemerintahan saat ini, dimana **Bapak Prabowo sendiri sebagai pembantu Presiden**, dengan mengemban jabatan sebagai Menteri Pertahanan (MENHAN) harus tegas berdiri membela Marwah Negara dan Presiden sebagai Simbol Negara.

Persoalan terkait dengan point a tersebut diatas, juga telah kami laporkan kepada Presiden Joko Widodo melalui surat No : tertanggal (Lampiran 18, Tanda Terima Pelaporan di Sekretariat Negara)

- **Menggunakan jabatan sebagai Ketua DPD Gerindra Papua Barat untuk Mengintervensi MUSDA Gerakan Pramuka Papua Barat 2022, agar terpilih kembali sebagai KaKwarda Gerakan Pramuka Papua Barat.**
 - i) Merasa tidak lagi memiliki jabatan Publik paska usai masa Jabatan selaku Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani bermanuver dalam MUSDA Gerakan Pramuka Papua Barat yang berlangsung 29 November 2022, untuk mendengarkan pertanggung jawaban kepengurusan 2017-2022, dan pemilihan Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat.
 - ii) Manuver Mohamad Lakotani tidak tanggung-tanggung untuk memuluskan langkahnya untuk kembali terpilih sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat periode 2022-2027. Yakni dengan mendatangkan **Drs Wim F Fimbay MM selaku KORWIL IV** yang berstatus Tahanan dan TERSANGKA Tindak Pidana Korupsi (Jika sebelumnya berstatus WBP atas Korupsi Dana Bencana Wasior pada saat direkomendasi sebagai KORWIL oleh Mohamad



- Lakotani di 2018, kini status **Drs Wim F Fimbay MM** sebagai Tahanan Rutan Teluk Bintuni dan tersangka dalam kasus korupsi lain). (**Lampiran 19**, Foto Kehadiran **Drs Wim F Fimbay MM**, Surat Mandat yang di tanda-tangani sendiri serta Putusan Hukum kasus lain **Drs Wim F Fimbay MM**)
- iii) Dalam Musda, Pertanggung-jawaban Mohamad Lakotani selaku Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat ternyata di tolak oleh Forum, usai pertanggung jawabannya di tolak oleh Forum. Mohamad Lakotani menghubungi para “Kepala Daerah” di Papua Barat yang di usung oleh Partai Gerindra maupun yang berstatus Kader Gerindra, diantaranya Bupati Fakfak, Untung Tamsil (Terlapor Skandal Korupsi Kab. Fakfak yang ditarik oleh Mohamad Lakotani menjadi Kader dan Ketua DPC Gerindra Fakfak) untuk mengintervensi peserta Musda yang berasal dari Kabupaten Fakfak. Untuk para Kepala Daerah yang di usung oleh Gerindra maupun kader Gerindra, di minta untuk membuat “keberatan” atas hasil Musda yang menolak Pertanggung Jawaban Mohamad Lakotani, dan memilih Lazarus Indouw sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat. (**Lampiran 20**, surat Keberatan hasil MUSDA yang digerakan oleh Mohamad Lakotani)

Tujuan daripada Mohamad Lakotani ini bukan tanpa dasar, selain untuk dapat memiliki Jabatan Publik yang dapat memperkokoh posisinya untuk meyakinkan Partai Gerindra, ada skandal Korupsi Besar di Tubuh Gerakan Pramuka Papua Barat selama kepemimpinan Mohamad Lakotani sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat.

- 4) **Dugaan Tindak Pidana Korupsi, selama menjabat sebagai KaKwarda Gerakan Pramuka Papua Barat 2017 - 2022, dimana terdapat Dana Gerakan Pramuka Papua Barat sebesar Rp. 30 Milyar yang tidak dapat di pertanggung jawabkan peruntukannya.**

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya diatas, Hasil Musda Gerakan Pramuka Papua Barat, ditemukan terjadi penyalahgunaan Anggaran sebesar Rp.30 Milyar yang tidak dapat di pertanggung jawabkan selama kepemimpinan Mohamad Lakotani sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat (**Lampiran 21**, Laporan Keuangan dan Hasil Rekomendasi Audit Internal)

- 5) **“Menjual” Jabatan Ketua DPD Gerindra Papua Barat untuk mencari keuntungan pribadi.**

Dari Laporan Masyarakat kepada PASTI Indonesia, yang dilakukan oleh Fredy Kerryanto selaku Ketua DPC Demokrat Kabupaten Fakfak yang juga merupakan anak dari Korban oleh Mohamad Lakotani. Bahwa pada perhelatan Pilkada Fakfak 2020, Ayah bersangkutan yang bernama **Hermanus Kerryanto** (**Lampiran 22**, Foto Korban Penipuan dan Foto Korban Penipuan saat berencana maju dalam Pilkada Kabupaten Fakfak 2020). Berkehendak maju sebagai kandidat dalam pilkada tersebut, dengan di iming-iming akan mendapatkan Rekomendasi Partai Gerindra apabila sanggup mengeluarkan Dana sebesar Rp.500.000.000 (terbilang Lima Ratus Juta Rupiah)



Kepada Partai Gerindra melalui Mohamad Lakotani sebagai Ketua DPD Gerindra Papua Barat. Namun Faktanya, **tidak ada rekomendasi Partai Gerindra yang keluar atas nama Hermanus Kerryanto, dan uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Mohamad Lakotani hingga saat ini.** Walaupun pada saat itu sebagaimana yang disampaikan oleh anak korban kepada PASTI Indonesia, Mohamad Lakotani menyampaikan bahwa: **“saya itu Ketua DPD Gerindra Papua Barat, saya Wakil Gubernur Papua Barat, Uang segitu tidak ada artinya untuk saya, buat apa saya tipu, kalau memang gak dapat Rekomendasi, saya kembalikan uang tersebut”.** Miris sekali bukan? Ketika Jabatan Ketua DPD Gerindra hanya untuk mencari keuntungan pribadi semata.

Apakah Gerindra masih berdiri pada Komitmen Anti Korupsi?

Menjadi pertanyaan bagi kami, PASTI Indonesia selaku lembaga yang pernah terjun aktif dalam pergerakan Nasional maupun di Papua Barat untuk mendukung Prabowo-Sandi dalam pilpres 2019. Apakah Bapak Prabowo dan Gerindra masih berdiri pada Komitmen Anti Korupsi, sebagaimana yang kerap kali Bapak Prabowo sampaikan pada Publik di 2019, **“Ibarat Kanker, Korupsi Indonesia sudah Stadium 4”.** Namun Jika melihat pembiaran Partai Gerindra terhadap Tindak Tanduk Mohamad Lakotani, bahkan kemudian memperpanjang SK yang bersangkutan sebagai Ketua DPD Gerindra Papua Barat, hal ini seolah berbanding terbalik dengan Sikap Bapak Prabowo yang mengebu-gebu ketika berbicara pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Kerugian GERINDRA jika terus mempertahankan Mohamad Lakotani sebagai Ketua DPD Gerindra Papua Barat

Memang harus diakui, suara Papua Barat tidaklah signifikan untuk mendorong Bapak Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden Pada Pilpres 2024. Namun apa menjadi kerugian besar bagi Bapak Prabowo dan Partai Gerindra apabila orang-orang seperti Mohamad Lakotani dipertahankan, diantaranya :

1. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ali Hamdan Bogra, S.I.P., M.Si. lebih memilih keluar dari Partai Gerindra ketika SK Mohamad Lakotani di perpanjang sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat. (**Lampiran 23**, Hal ini disampaikan langsung oleh Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ali Hamdan Bogra, S.I.P., M.Si. pada saat pertemuan diskusi terkait Papua Barat bersama Direktur PASTI Indonesia)
2. Terjadi Pemalangan Kantor DPD Gerindra Papua Barat oleh Para Kader Gerindra Papua Barat atas kegagalan Mohamad Lakotani. Akibat Insiden ini, Publik melihat bahwa ada pembiaran persoalan oleh Partai Gerindra.
3. Selama kepemimpinan Lakotani, dan terbukti dalam Pileg 2019, tidak ada satu Kader Gerindra Papua Barat yang berhasil masuk ke DPR RI maupun DPRD Provinsi Papua Barat, justru yang terjadi suara Gerindra Anjlok dan Kepercayaan Publik pada Partai Gerindra khususnya di Papua Barat menurun drastis berbeda dengan 2014 lalu.
4. Persoalan ini akan menjadi **“duri dalam daging”** yang akan mengerus Kepercayaan Publik kepada Bapak Prabowo yang akan maju pada Pilpres 2024, dimana



PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec. Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669

Kredibilitas Partai Gerindra akan dipertanyakan Publik terkait dengan beberapa persoalan di Papua Barat, diantaranya Ketua DPC Kaimana yang notabene Mantan Napi Tipidkor yang ketika diangkat sebagai Ketua DPC Gerindra masih berstatus **Masa Percobaan**.

Kami, PASTI Indonesia sendiri masih mempercayai figur Bapak Prabowo sebagai Pribadi yang berjiwa Ksatria dan Calon Pemimpin yang ideal untuk Indonesia di 2024. Oleh karena itu melalui surat ini, kami memohon agar Bapak Prabowo dapat mengambil langkah tegas dan cepat untuk menyelamatkan Wajah Partai Gerindra khususnya di Papua Barat, agar tidak menjadi batu sandungan Bapak di Kampanye Pilpres 2024.

Jika kekuatiran Bapak Prabowo, bahwa tidak ada figur yang mampu menggantikan Mohamad Lakotani, maka kekuatiran itu adalah tanpa dasar. Karena Papua Barat memiliki banyak figur yang jauh lebih mempuni daripada seorang Mohamad Lakotani.

Sekiranya menjadi perhatian serius dari Bapak, mengingat ini adalah Tahun Politik, dan hal semacam ini sangat tidak baik apabila menjadi konsumsi Publik, yang dimana akan sangat berpengaruh pada "suara" Pilres Bapak sendiri di 2024.

Atas perhatian Bapak Prabowo (Garuda 08) yang kami hormati dan cintai, kami ucapkan terima kasih.

Tangerang, 24 Mei 2023

Atas Nama Perhimpunan PASTI Indonesia



Susanto (Arlex Long Wu)
Direktur PASTI Indonesia

PASTI INDONESIA

7

WWW.PASTIINDONESIA.ORG

Email : Seknas@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org

MENGAWASI & MEMBERDAYAKAN TURUN KE BAWAH



PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

**Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec. Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669**

Lampiran 1

LHKPN Mohamad Lakotani

**Dari Awal Maju sebagai Calon Wakil
Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015
(Gagal)**

**Hingga menjabat sebagai Wakil Gubernur
Papua Barat, di usung oleh Partai
Gerindra**

PASTI INDONESIA

WWW.PASTIINDONESIA.ORG

Email : Seknas@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org

MENGAWASI & MEMBERDAYAKAN TURUN KE BAWAH



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

A

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 15 April 2016 No. 30

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA

I. DATA PRIBADI

- 1. Nama : MOHAMAD LAKOTANI, S.H., M.Si.
- 2. Jabatan : PNS - (CALON WAKIL BUPATI KAIMANA)
- 3. Alamat Kantor : Jl. KASUARINA, KAIMANA
- 4. Tanggal Pelaporan : 1 Agustus 2015

II. DATA HARTA

A. HARTA TIDAK BERGERAK Rp. **180.600.000**
(TANAH DAN BANGUNAN)

- 1. Tanah seluas 1.159 m² , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2008 NJOP Rp.150.000
- 2. Tanah seluas 315 m² , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari ---, perolehan tahun 2006 NJOP Rp.150.000
- 3. Tanah seluas 543 m² , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2009 NJOP Rp.150.000
- 4. Tanah seluas 296 m² , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2008 NJOP Rp.150.000
- 5. Tanah seluas 900 m² , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2003 NJOP Rp.90.000.000
- 6. Tanah seluas 695 m² , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari ---, perolehan tahun 2013 NJOP Rp.90.000.000
- 7. Tanah seluas 635 m² , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari ---, perolehan tahun 2005 NJOP Rp.0

B. HARTA BERGERAK

a. ALAT TRANSPORTASI Rp. **172.000.000**
DAN MESIN LAINNYA

- 1. Mobil, merk TOYOTA YARIS, tahun pembuatan 2009, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2011 nilai jual Rp.150.000.000

2. Motor, merk HONDA, tahun pembuatan 2008, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2008 nilai jual Rp.7.000.000
3. Motor, merk YAMAHA, tahun pembuatan 2013, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2013 nilai jual Rp.15.000.000

b. PETERNAKAN, Rp. **300.000.000**

**PERIKANAN,
PERKEBUNAN,
PERTANIAN,
KEHUTANAN,
PERTAMBANGAN DAN
USAHA LAINNYA**

1. PERKEBUNAN, sejumlah 3 HA KEBUN PALA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2010, dengan nilai jual Rp.300.000.000

c. HARTA BERGERAK Rp. **0**
LAINNYA

1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1999 sampai dengan 2013 dengan nilai jual Rp.0

C. SURAT BERTAHAGA Rp. **0**

D. GIRO DAN SETARA KAS Rp. **110.000.000**
LAINNYA

1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI dengan nilai Rp.110.000.000

E. PIUTANG Rp. **0**

TOTAL HARTA (II) Rp. **762.600.000**

III. HUTANG Rp. **0**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III) Rp. **762.600.000**

Jakarta, 13 Oktober 2015

MENGETAHUI,
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
PLH. DEPUTI

DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN
Pemeriksaan LHKPN
PLH. DIREKTUR

TTD

GIRI SUPRAPDIONO

TTD

ADLINSYAH M.N

Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

B1

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 4 Nopember 2016 No. 88

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)**

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOHAMAD LAKOTANI, S.H., M.Si.
2. Jabatan : CALON WAKIL GUBERNUR - PROVINSI PAPUA BARAT PERIODE 2017 - 2022
3. NHK : 208379
4. Alamat Kantor : Jl. ____, ---
5. Tanggal Pelaporan : 1 Agustus 2015, 24 Agustus 2016

Status Laporan

1 Agustus 2015	24 Agustus 2016
----------------	-----------------

II. DATA HARTA

**A. HARTA TIDAK BERGERAK
(TANAH DAN BANGUNAN)**

- | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| | Rp. 180.600.000 | | Rp. 681.450.000 |
| 1. Tanah seluas 635 m2 , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2005 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya) | ----- | | Rp. 95.250.000 |
| 2. Tanah seluas 900 m2 , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2003 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya) | Rp. 90.000.000 | | Rp. 135.000.000 |

	1 Agustus 2015	24 Agustus 2016
3. Tanah seluas 695 m ² , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2013 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 90.000.000	Rp. 104.250.000
4. Tanah seluas 543 m ² , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2009 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 150.000	Rp. 81.450.000
5. Tanah seluas 296 m ² , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2008 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 150.000	Rp. 44.400.000
6. Tanah seluas 1.159 m ² , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2008 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 150.000	Rp. 173.850.000
7. Tanah & Bangunan seluas 315 m ² & 180 m ² , di Kabupaten KAIMANA, yang berasal dari HASIL SENDIRI , perolehan tahun 2006 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 150.000	Rp. 47.250.000

B. HARTA BERGERAK

a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA

	Rp. 172.000.000	Rp. 172.000.000
1. Mobil, merk TOYOTA YARIS, tahun pembuatan 2009, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2011	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000
2. Motor, merk HONDA, tahun pembuatan 2008, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2008	Rp. 7.000.000	Rp. 7.000.000
3. Motor, merk YAMAHA, tahun pembuatan 2013, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2013	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000

	1 Agustus 2015	24 Agustus 2016
b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000
1. PERKEBUNAN, sejumlah 3 HA KEBUN PALA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2010	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000
c. HARTA BERGERAK LAINNYA	----	----
1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1999 sampai dengan 2014 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)	----	----
C. SURAT BERTERIMA	Rp. 0	Rp. 0
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA	Rp. 110.000.000	Rp. 190.000.000
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI (Penambahan Data Harta Kekayaan, Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya)	Rp. 110.000.000	Rp. 175.000.000
2. Yang berasal dari --- (Penambahan Data Harta Kekayaan)	----	Rp. 15.000.000
E. PIUTANG	Rp. 0	Rp. 155.000.000
1. Piutang dalam bentuk PINJAMAN UANG (Penambahan Piutang baru)	----	Rp. 155.000.000
TOTAL HARTA (II)	Rp. 762.600.000	Rp. 1.498.450.000
III. HUTANG	----	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III)	Rp. 762.600.000	Rp. 1.498.450.000



Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Mei 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
SUB UNIT KERJA : WAKIL KEPALA LEMBAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMAD LAKOTANI**
2. Jabatan : **WAKIL GUBERNUR**
3. NHK : **208379**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

5.065.894.000

1. Tanah Seluas 635 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 115.000.000
2. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 165.000.000
3. Tanah Seluas 695 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 115.250.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 543 m2/144 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 296 m2/115 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
6. Tanah Seluas 1159 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 185.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/180 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
8. Tanah Seluas 12500 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000
9. Tanah Seluas 3000000 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL
SENDIRI Rp. 500.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/118 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.157.584.000



11. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
12. Bangunan Seluas 40 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 648.060.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 516.117.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 371.117.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 439.760.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.693.964.230

F. HARTA LAINNYA Rp. 155.000.000

Sub Total Rp. 8.870.735.230

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.870.735.230

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Oktober 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
SUB UNIT KERJA : WAKIL KEPALA LEMBAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMAD LAKOTANI**
2. Jabatan : **WAKIL GUBERNUR**
3. NHK : **208379**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp.

6.360.250.000

1. Tanah Seluas 635 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 115.000.000
2. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 165.000.000
3. Tanah Seluas 695 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 115.250.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 543 m2/144 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 296 m2/115 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
6. Tanah Seluas 1159 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 185.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/180 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
8. Tanah Seluas 12500 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000
9. Tanah Seluas 3000000 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL
SENDIRI Rp. 500.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/118 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000



11. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
12. Bangunan Seluas 40 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 829.117.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 371.117.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 439.760.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 4.183.090.444**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 11.812.217.444**III. HUTANG** Rp. 1.746.619.195**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 10.065.598.249

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMAD LAKOTANI**
2. Jabatan : **WAKIL GUBERNUR**
3. NHK : **208379**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **6.350.500.000**

1. Tanah Seluas 635 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 117.000.000
2. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 165.500.000
3. Tanah Seluas 695 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 115.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 543 m2/144 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 296 m2/115 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah Seluas 1159 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 187.500.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/180 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
8. Tanah Seluas 12500 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL
SENDIRI Rp. 205.000.000
9. Tanah Seluas 30000 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL
SENDIRI Rp. 500.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/118 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
11. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL
SENDIRI Rp. 710.000.000
12. Bangunan Seluas 40 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL



SENDIRI Rp. 735.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 752.500.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 335.000.000

2. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000

4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 335.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 475.640.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 6.501.949.083**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 14.080.589.083**III. HUTANG** Rp. 704.494.809**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 13.376.094.274

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMAD LAKOTANI**
2. Jabatan : **WAKIL GUBERNUR**
3. NHK : **208379**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 6.405.000.000**

1. Tanah Seluas 635 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 120.000.000
2. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 170.000.000
3. Tanah Seluas 695 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 120.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 543 m2/144 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 296 m2/115 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 151.000.000
6. Tanah Seluas 1159 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI
Rp. 188.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/180 m2 di KAB / KOTA
KAIMANA, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
8. Tanah Seluas 12500 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL
SENDIRI Rp. 206.000.000
9. Tanah Seluas 30000 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL
SENDIRI Rp. 510.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/118 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
11. Tanah Seluas 5589 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL
SENDIRI Rp. 710.000.000
12. Bangunan Seluas 40 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL



SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 600.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000

3. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 CVT NSP151R - (CHXVKD) Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 273.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 513.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 7.342.180.518**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 14.860.180.518**III. HUTANG** Rp. 704.494.809**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 14.155.685.709

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

PERBANDINGAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2022/Periodik - 2021)

NAMA : MOHAMAD LAKOTANI
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
SUB UNIT KERJA : WAKIL KEPALA LEMBAGA
JABATAN : WAKIL GUBERNUR
NHK : 208379
PERBANDINGAN
LHKPN : 2018 (31 Desember 2018)

* Situs ini hanya menampilkan Perbandingan Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas LHKPN yang disampaikan kepada KPK menggunakan Aplikasi e-LHKPN (dimulai dari LHKPN Tahun 2018 dan seterusnya).

I. DATA HARTA		Pelaporan LHKPN 31 Desember 2021	Pelaporan LHKPN 31 Desember 2018	Kenaikan / (penurunan) Jumlah %	
A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp	6.405.000.000	5.065.894.000	1.339.106.000	26,43%
1. Tanah Seluas 635 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI		0	115.000.000	0	0,00%
2. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI		0	165.000.000	0	0,00%
3. Tanah Seluas 695 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI		0	115.250.000	0	0,00%
4. Tanah dan Bangunan Seluas 543 m2/144 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI		0	150.000.000	0	0,00%
5. Tanah dan Bangunan Seluas 296 m2/115 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI		0	180.000.000	0	0,00%
6. Tanah Seluas 1159 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI		0	185.000.000	0	0,00%
7. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/180 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI		0	250.000.000	0	0,00%
8. Tanah Seluas 12500 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI		0	200.000.000	0	0,00%
9. Tanah Seluas 3000000 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI		0	500.000.000	0	0,00%
10. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/118 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI		0	2.157.584.000	0	0,00%

11. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL SENDIRI	0	400.000.000	0	0,00%
12. Bangunan Seluas 40 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI	0	648.060.000	0	0,00%
13. Tanah Seluas 635 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI	120.000.000	0	0	0,00%
14. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI	170.000.000	0	0	0,00%
15. Tanah Seluas 695 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI	120.000.000	0	0	0,00%
16. Tanah dan Bangunan Seluas 543 m2/144 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI	220.000.000	0	0	0,00%
17. Tanah dan Bangunan Seluas 296 m2/115 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI	151.000.000	0	0	0,00%
18. Tanah Seluas 1159 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI	188.000.000	0	0	0,00%
19. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/180 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI	260.000.000	0	0	0,00%
20. Tanah Seluas 12500 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI	206.000.000	0	0	0,00%
21. Tanah Seluas 30000 m2 di KAB / KOTA KAIMANA, HASIL SENDIRI	510.000.000	0	0	0,00%
22. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/118 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI	3.000.000.000	0	0	0,00%
23. Tanah Seluas 5589 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL SENDIRI	710.000.000	0	0	0,00%
24. Bangunan Seluas 40 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI	750.000.000	0	0	0,00%

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 600.000.000 516.117.000 83.883.000 16,25%

1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI	0	130.000.000	0	0,00%
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI	0	5.000.000	0	0,00%
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI	0	10.000.000	0	0,00%
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI	0	371.117.000	0	0,00%
5. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI	320.000.000	0	0	0,00%
6. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI	6.500.000	0	0	0,00%

7. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 CVT NSP151R - (CHXVKD) Tahun 2021, HASIL SENDIRI		273.500.000	0	0	0,00%
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp	513.000.000	439.760.000	73.240.000	16,65%
D. SURAT BERHARGA	Rp	0	0	0	
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp	7.342.180.518	2.693.964.230	4.648.216.288	172,54%
F. HARTA LAINNYA	Rp	0	155.000.000	-155.000.000	-100,00%
Sub Total	Rp	14.860.180.518	8.870.735.230	5.989.445.288	67,52%
II. HUTANG	Rp	704.494.809	0	0	
III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-II)	Rp	14.155.685.709	8.870.735.230	5.284.950.479	59,58%



PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

*Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec. Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669*

Lampiran 2

BATU API FAKFAK GERAKAN SIMPATISAN DAN PENDUKUNG PRABOWO SANDI DI FAKFAK - PAPUA BARAT

PASTI INDONESIA

WWW.PASTIINDONESIA.ORG

Email : Seknas@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org

MENGAWASI & MEMBERDAYAKAN TURUN KE BAWAH



AN "BU API" FAKFAK

#2019
GANTIPRESIDEN

PRABOWO-SANDIAGA
PAS!!!

PRABOWO-SANDIAGA
PAS!!!

PRABOWO-SANDIAGA
PAS!!!







REKORAN "BATU API" PAKFAK
Untuk PAS 2019



AN "BATU API" FAKFAK

BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI

FILA

BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI











RELAWAN "BATU API" FAKFAK
Untuk
PRABOWO - SANDIAGA
2019 - 2024
PRABOWO SANDIAGA
PRESIDEN - WAKIL PRESIDEN





PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

*Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec. Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669*

Lampiran 3

**GERAKAN NYATA KE JAKARTA DARI
PAPUA BARAT UNTUK MEMBERIKAN
ASPIRASI DUKUNGAN BAGI
PRABOWO SANDI
(MENOLAK KLAIM PAPUA DUKUNG 01)**

PASTI INDONESIA

WWW.PASTIINDONESIA.ORG

Email : Seknas@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org

MENGAWASI & MEMBERDAYAKAN TURUN KE BAWAH

Sabtu 26 Januari 2019, 14:58 WIB

Datang ke Jakarta, Kelompok Warga Papua Ini Deklarasi Dukung Prabowo

Robi Setiawan - detikNews



Foto: Timses Prabowo-Sandi

Jakarta - Sekelompok masyarakat Papua



Fadli Zon 

@fadlizon



Pertemuan dengan
[@PEPESOfficial](#) dan Relawan
Prabowo Sandi Papua Barat di
Ruang Kerja [@DPR_RI](#)



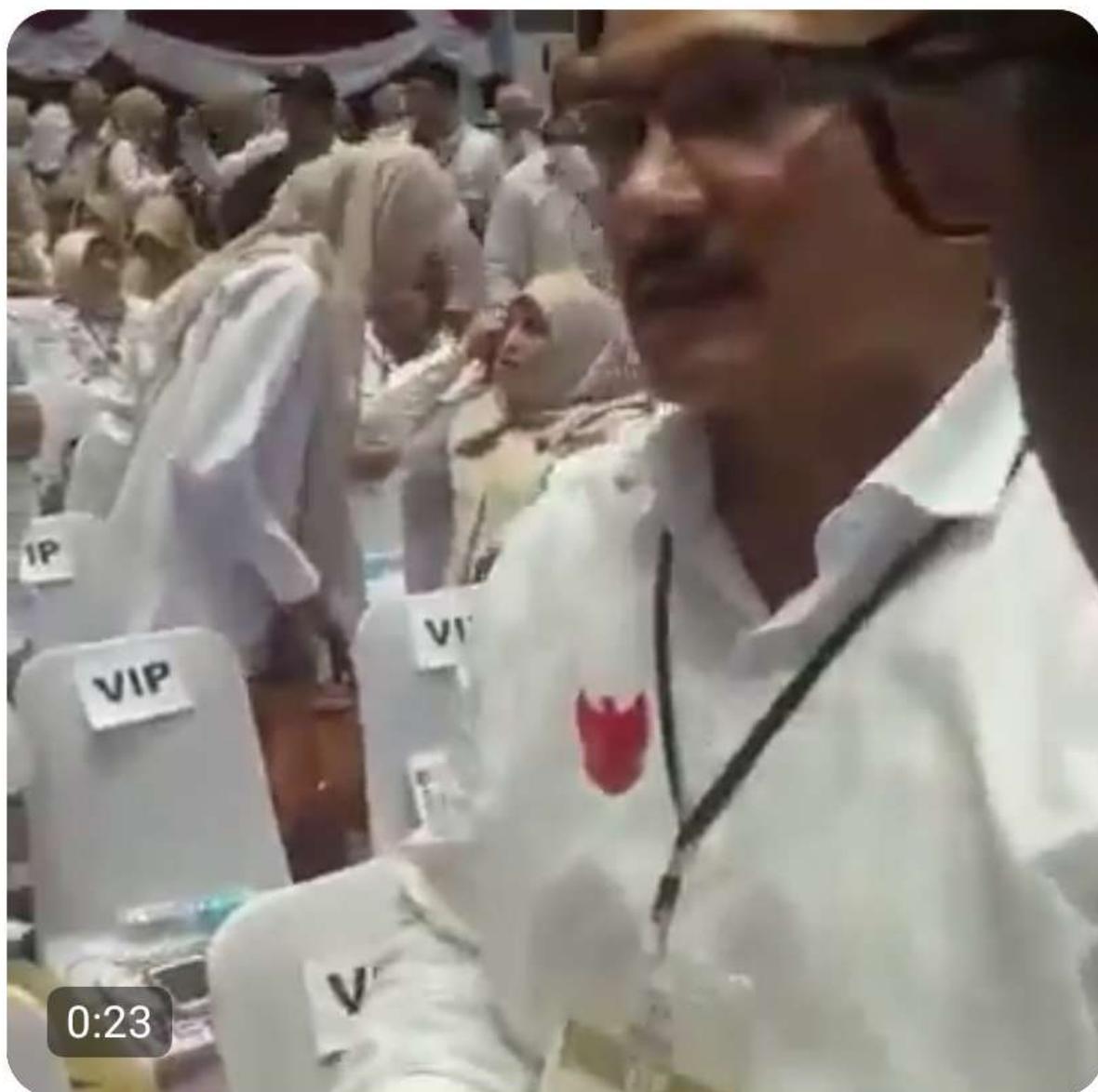
1:11 PM · 18 Jan 19 · [Twitter for Android](#)



FERDINAND HUTAHAEAN @Fe... · 3h ✓

Papua jangan lagi hanya jadi mainan politik. Kesejahteraan Papua dan kemajuan Papua harus nyata..!! Kedepan era @prabowo @sandiuno tdk boleh lg Papua hanya retorika. Kita bangun Papua secara nyata.

[@arlex_wu](#)



5,641 views



66



243



777



Dukung Prabowo, Milenial Tionghoa: Cukup Sipit Dimata, Jangan Sipitin Otak

OPPOSITENEWS – Pemuda milenial, Arlex Wu dikenal pendukung militan pasangan Prabowo-Sandi di media sosial. Kicauan-kicauan Arlex kerap membuat panas Jokower....



Arlex Wu - Foto: Twitter

Tanda Terima

Saya yang ber tanda tangan dibawah ini ,

Nama : Carlos Rogger Evanbino

Jabatan : Staff BPN

Telah menerima dokumen berupa :

1. Formulir C1 KUK dan Relawan Prabowo - Sandiaga Uno
Se Nusantara, berupa 1 berkas file jilid-an dan 1 buah
flashdisk (soft copy)

Keterangan :

Persebaran TPS yang dilaporkan dari data c1, secara acak (Nasional)
mencakup beberapa wilayah di Indonesia

Jakarta, 22 April 2019

**BADAN PEMENANGAN NASIONAL
PRABOWO - SANDI**

Yang Menerima,



Carlos Rogger Evanbino



ADIL MAKMUR
BERSAMA
**PRABOWO
SANDI**

Yang Menyerahkan,



ALEX

Hp. 08111.288.939

PROGRES REPORT
MODEL KERJA TIM PEMENANGAN
PRABOWO – SANDI



Oleh : Tim Perubahan PS-02



PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec. Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669

Lampiran 4

Pemberian Doa dan Restu melalui pemasangan Topi Adat Papua maupun Songkok Merah (khas Fakfak) sebagai simbol perjuangan







Kepala Suku Papua Barat Bertekad Menangkan Prabowo-Sandi

JAKARTA – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Salahuddin Uno didatangi sejumlah tokoh dan Kepala Suku dari wilayah Papua Barat di Prabowo-Sandi Media Center yang terletak di Jalan Sriwijaya I nomor 35, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Di antara mereka merupakan Penasihat tujuh Kepala Suku Kabupaten Teluk Bintuni dan Ketua Relawan Batu Api Kabupaten Fak Fak, Papua Barat tersebut secara tegas mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019.

"Memang kami adalah timnya wong cilik. Tapi kami adalah timnya masyarakat Kaki Abu. kami datang untuk menyampaikan kepada bapak,

bahwa kami siap mendukung bapak dan Pak Prabowo sebagai capres dan cawapees, dan kami siap untuk tekad bulat memenangkan," ujar Ketua Relawan Batu Api, Yusuf Patiran kepada Sandiaga Uno.

"Dan kami siap dengan tekad bulat memenangkan Pak Prabowo dan Pak Sandi di Papua Barat," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Sandi juga diberikan sebuah Topi Cendrawasih dan Tas Noken khas Papua sebagai simbol persaudaraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Falsafah kehidupan yang kami simpulkan dengan songko merah sebagai simbol nasionalisme, agama. Dan bagi kami orang Indonesia Timur,

kain merah di kepala itu adalah simbol nasionalisme, agama dan adat. Istilahnya luas dan menyeluruh, senasib dan sepenanggungan, berjiwa satu, bangsa dan satu negara," terang Yusuf Fatiran.

Terakhir, para pendukung yang datang dari Papua Barat ke Jakarta atas biaya sendiri tersebut juga berpeseran menitipkan amanah kepada Prabowo dan Sandi jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden mendatang.

"Mudah-mudahan ketika bapak menjabat nanti, bapak akan melihat kita sebagai keluarga. Jadi merah di kepala, putih di hati, saya yakin bendera merah-putih akan berkibar dengan baik dan tenang," tandasnya. (Yendhi/bu)



Sandiaga Uno Mengangkat tangan Kepala Suku dari wilayah Papua Barat.



PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

*Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec. Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669*

Lampiran 5

Pemalangan Kantor DPD Gerindra Papua Barat oleh Para Pengurus DPC. Sebagai bentuk Protes atas Kegagalan Kepemimpinan Mohamad Lakotani.

PASTI INDONESIA

WWW.PASTIINDONESIA.ORG

Email : Seknas@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org

MENGAWASI & MEMBERDAYAKAN TURUN KE BAWAH



1. YERONGGALAH SITI - BUKU LANTARAN / BUKU INI
TIDAK ADA
2. KANTIN SITI - TIDAK BERTANGGUNG
3. TIDAK ADA SITI - BERTANGGUNG SITI - BUKU SITI
DI-PPA (SITI)
4. SITI - BERTANGGUNG SITI - BUKU SITI - BUKU SITI
TIDAK ADA BERTANGGUNG SITI - BUKU SITI
5. SITI - BERTANGGUNG SITI - BUKU SITI - BUKU SITI
6. BERTANGGUNG SITI - BUKU SITI - BUKU SITI - BUKU SITI
7. BERTANGGUNG SITI - BUKU SITI - BUKU SITI - BUKU SITI
8. BERTANGGUNG SITI - BUKU SITI - BUKU SITI - BUKU SITI
9. BERTANGGUNG SITI - BUKU SITI - BUKU SITI - BUKU SITI
10. BERTANGGUNG SITI - BUKU SITI - BUKU SITI - BUKU SITI

PPA
ER,
ID
BAGAI



KEPADA DPP PARTAI GERINDRA DI JAKARTA DANWA:
KAMI KABER, PENGURUS, PENDUKUNG DAN SIMPATISAN
PARTAI GERINDRA PAPUA BARAT MENOLAK DENGAN "TEGAS"
BAPAK M. M. MOTANI, SH., M.SI
SEBAGAI NETUA D. GERINDARA PAPUA BARAT







PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec. Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669

Lampiran 6

SK Perpanjangan masa jabatan
Mohamad Lakotani sebagai Ketua DPD
Gerindra Papua Barat.



PARTAI
DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
Nomor : 06-0181/Kpts/DPP-GERINDRA/2022



Lampiran 7

SK Penetapan DPC Gerindra Kabupaten Kaimana, dimana Ketua DPC yang diangkat adalah seorang Mantan Napi Tipodkor Kabupaten Kaimana. Masih berstatus Bebas Bersyarat dan menjalani Masa Percobaan.



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
Nomor : 06-0178/Kpts/DPP-GERINDRA/2022**

Tentang

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT**

Dengan mengharap Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP PARTAI GERINDRA) setelah :

MENIMBANG : Bahwa demi kelancaran jalannya organisasi di wilayah Kabupaten Kaimana, dalam rangka mencapai tujuan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), maka dipandang perlu untuk mengesahkan **Pergantian Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Partai GERINDRA) Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.**

MENINGGAT : 1. Anggaran Dasar Partai Gerakan Indonesia Raya Ta. 2020 Pasal 19 ayat (2) k, o 23), Pasal 20 ayat (2) d, Pasal 24 ayat (2) b dan Pasal 77.
2. Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya Ta. 2020 Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 13, dan Pasal 14.

MEMPERHATIKAN : - Surat DPD Partai GERINDRA Provinsi Papua Barat Nomor: PB/04-017/B/DPD-GERINDRA/2022 tanggal 17 April 2022 tentang usulan perubahan susunan personalia DPC Partai GERINDRA Kabupaten Kaimana.

10 JUNI 2022

DOKUMEN INI DITERBITKAN OLEH
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
SESUAI DENGAN ASLINYA

H. AHMAD MUZANI
SEKRETARIS JENDERAL

Keputusan Rapat Ketua Dewan Pembina dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) tanggal 17 Mei 2022 tentang Pergantian Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.

SK DPP Nomor : 06-0178/Kpts/DPP-GERINDRA/2022



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai GERINDRA) Nomor: 10-0402/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Partai GERINDRA) Kabupaten Kaimana dan *dinyatakan tidak berlaku lagi*.
- KEDUA** : Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Partai GERINDRA) Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan nama dan jabatan sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan didalamnya.

10 JUNI 2022
DOKUMEN INI DITERBITKAN OLEH
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
SESUAI DENGAN ASLINYA

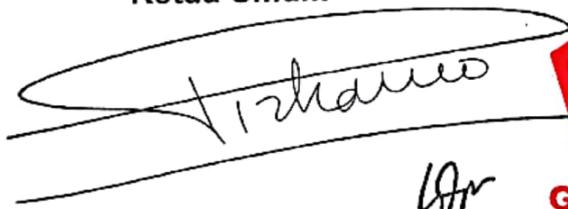
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Juni 2022


H. AHMAD MUZANI
SEKRETARIS JENDERAL


DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(DPP PARTAI GERINDRA)

Ketua Dewan Pembina/
Ketua Umum

Sekretaris Jenderal



H. PRABOWO SUBIANTO 





H. AHMAD MUZANI



Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 06-0178/Kpts/DPP-GERINDRA/2022

Tanggal : 10 Juni 2022

Tentang : **Susunan Personalia Pengurus DPC Partai GERINDRA Kabupaten Kaimana**

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Drs. MOH. NASIR AITURAUW, M.Si.
2.	Wakil Ketua	NURDIN REASA
3.	Wakil Ketua	ANTON MAGAI, S.P.
4.	Wakil Ketua	Ny. ARFIA FIMBAY
5.	Wakil Ketua	USMAN LA OBO
6.	Wakil Ketua	Ny. BIONDA M. DJAFAR
7.	Wakil Ketua	IRWAN LATURAUW
8.	Wakil Ketua	JIBRAN MATULU
9.	Wakil Ketua	Ny. YULICE BLESKADIT
10.	Wakil Ketua	Ny. FITRIA RENWARIN
11.	Wakil Ketua	HASAN SIRFEFA
12.	Wakil Ketua	SALIN IHA
13.	Wakil Ketua	Ny. MAYA ALHAMID
14.	Wakil Ketua	ANTONIUS BERUATWARIN
15.	Wakil Ketua	Ny. LILI UFNIA
16.	Wakil Ketua	Ny. GRESS MARIAM TALAHATU
17.	Wakil Ketua	PASKALIS BETINA
18.	Wakil Ketua	Ny. PASCALINA SIKTEUBUN
19.	Wakil Ketua	ABDULA KASONGAT
20.	Wakil Ketua	ELISA HAUMA

10 JUN 2022
DOKUMEN INI DITERBITKAN OLEH
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
SESUAI DENGAN ASLINYA

H. AHMAD MUZANI
SEKRETARIS JENDERAL



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

21.	Wakil Ketua	PIETER ESURU
22.	Wakil Ketua	Ny. MARIA MARAMPA
23.	Wakil Ketua	AWAT ALHAMID
24.	Sekretaris	REYNOLDSON EFFENDY BLESS, S.H.
25.	Wakil Sekretaris	Ny. NURAINI WATORA
26.	Wakil Sekretaris	BANAR YUNIZAR KUBEWA, S.H.
27.	Wakil Sekretaris	YOSEP SABONO
28.	Wakil Sekretaris	Ny. FERONIKA ASMOROM
29.	Bendahara	Ny. RUTHVIANI ASNAT BLESS
30.	Wakil Bendahara	Ny. ENGGELINA BUSIRA
31.	Wakil Bendahara	Ny. AMINA REASA
32.	Wakil Bendahara	Ny. ROOSDIANA MALUA

10 JUNI 2022

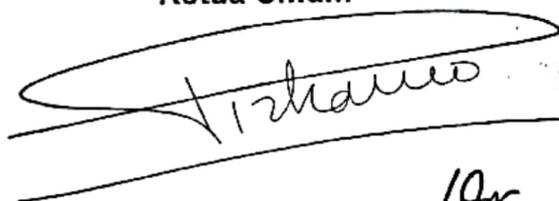
DOKUMEN INI DITERBITKAN OLEH
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
SESUAI DENGAN ASLINYA

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Juni 2022


H. AHMAD MUZANI
SEKRETARIS JENDERAL


**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(DPP PARTAI GERINDRA)**

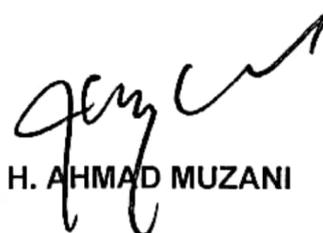
**Ketua Dewan Pembina/
Ketua Umum**



H. PRABOWO SUBIANTO

Sekretaris Jenderal





H. AHMAD MUZANI



Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 06-0178/Kpts/DPP-GERINDRA/2022

Tanggal : 10 Juni 2022

Tentang : **Susunan Personalia Dewan Penasehat DPC Partai GERINDRA Kabupaten Kaimana**

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	USMAN PUASA
2.	Anggota	STEPANUS LEMAUK
3.	Anggota	SYARIFUDIN WERFETE
4.	Anggota	Ny. MINCE MAHGARITA LEONG
5.	Anggota	Ny. RUTH WERFETE

DOKUMEN INI DITERBITKAN OLEH
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
SESUAI DENGAN ASLINYA

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 10 Juni 2022

H. AHMAD MUZANI
SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(DPP PARTAI GERINDRA)

Ketua Dewan Pembina/
Ketua Umum

H. PRABOWO SUBIANTO

Sekretaris Jenderal



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PIMPINAN PUSAT

H. AHMAD MUZANI



PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec. Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669

Lampiran 8

Pemberitahuan Keputusan Menteri
Hukum dan HAM Republik Indonesia
terkait dengan status Drs. Muh. Nasir
Aituruuw

PASTI INDONESIA

WWW.PASTIINDONESIA.ORG

Email : Seknas@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org

MENGAWASI & MEMBERDAYAKAN TURUN KE BAWAH



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PAS-1161.PK.01.04.06 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa kepada Narapidana yang telah melaksanakan program pembinaan dengan baik, maka perlu diberikan Pembebasan Bersyarat;
- b. Bahwa pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Narapidana harus telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta sesuai rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan sebagaimana pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan surat Penetapan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-61.PK.01.04.05 TAHUN 2020 Tanggal 14 Oktober 2020, atas Nota Dinas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS/163/X/2020 Tanggal 07 Oktober 2020 tentang pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberian pembebasan bersyarat Narapidana.
- Mengingat : 1. Pasal 15 dan pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38461), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632) dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA**

- KESATU** : Berdasarkan hasil rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tanggal 8 September 2020 memberikan pembebasan bersyarat kepada Narapidana yang namanya tercantum dalam lajur 3 (tiga) daftar terlampir.
- KEDUA** : Bahwa selama dalam masa percobaan, ditunjuk sebagai tempat kediamannya sebagaimana tercantum dalam lajur 8 (delapan) daftar terlampir.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala LAPAS, LPKA dan RUTAN untuk melaksanakan pembebasan bersyarat dimaksud dalam diktum pertama di atas pada lajur 9 (sembilan), pada tanggal tersebut dalam lajur 6 (enam) daftar terlampir.
- KEEMPAT** : Meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri dalam lajur 10 (sepuluh) untuk menerima penyerahan (pengawasan awal) Narapidana yang akan melaksanakan Pembebasan Bersyarat.
- KELIMA** : Meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri tersebut dalam lajur 11 (sebelas) untuk melaksanakan pengawasan atas ditaatinya syarat-syarat selama Narapidana dimaksud dalam masa percobaan yang berakhir pada tanggal seperti tersebut dalam lajur 7 (tujuh) daftar terlampir dan menyampaikan laporan hasil pengawasan tersebut setiap tiga bulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- KEENAM** : Memerintahkan kepada Balai Pemasyarakatan yang tercantum dalam lajur 12 (dua belas) daftar terlampir untuk melaksanakan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pembebasan bersyarat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelaksanaan pembebasan bersyarat oleh Kepala LAPAS, LPKA dan RUTAN sebagaimana diktum kedua dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 15 Oktober 2020

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat di Manokwari
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana
3. Bupati Kaimana Di Kaimana
4. Kepala Lapas Kelas III Kaimana
5. Kepala Bapas Bapas Kelas II Fakfak
6. Kapolres Kaimana Di Kaimana
7. Narapidana DRS.MUH. NASIR AITUARAUW.MSC
Lapas Kelas III Kaimana

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAM RI
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh

Reynhard Sitonga
NIP. 67090332000001000



Surat Keputusan ini dapat divalidasi dengan cara scan QR Code pada samping kiri atau membuka <http://layanan.djtnepas.go.id/layanan/integrasi/> kemudian masukan kode Barcode.



30e4567f08195cd13159c8175ea08098

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PAS-1161.PK.01.04.06 TAHUN 2020

TANGGAL : 15 Oktober 2020

1	No. Urut Sidang TPP Pusat	XXII
2	a. Surat Usul Pembebasan Bersyarat dari / Tanggal / Nomor b. Tanggal Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Unit Pelaksana Teknis	a. Kepala Lapas Kelas III Kaimana Tgl. 07-07-2020 Nomor W.31.PAS.07.PK.01.05.01-359 b. 07 Juli 2020
3	a. Nama / Umur Narapidana b. Kewarganegaraan c. Agama d. Perkara / Pasal e. Nomor / Tanggal Putusan f. Ditahan sejak g. Lama Pidana / Hukuman h. Tgl. Bebas Awal i. Jumlah remisi j. Tgl. Bebas akhir k. Denda l. Uang Pengganti	a. DRS.MUH. NASIR AITUARAUW,MSC / 55 Tahun b. WNI c. Islam d. Korupsi / PSL Pasal 2 (1) UU 31 Tahun 1999 e. 2897K/Pid.Sus/2019/08 Oktober 2019 f. 02-04-2018 g. 4 Tahun, 0 Bulan, 0 Hari h. 02-04-2022 i. 6 Bulan,0 Hari j. 04-10-2021 k. Rp 200.000.000 - Subs. 0 Tahun, 6 Bulan, 0 Hari Kurungan Ket.SB l. Rp 0 - Pid. Penj. 0 Tahun, 0 Bulan, 0 Hari Ket.BB
4	a. Nomor daftar b. Nomor register	a. - b. B/16/2019
5	Tanggal Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.	08-09-2020
6	Tanggal Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat	02-02-2021
7	Masa percobaan berakhir pada tanggal	04-10-2022
8	Menunjuk tempat kediaman	Jln.diponegoro_kel.kaimana_kab.kaimana
9	Kepala UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan	Lapas Kelas III Kaimana
10	Kepala Kejaksaan Negeri yang melaksanakan pengawasan awal Narapidana yang akan menjalani Pembebasan Bersyarat	Kaimana
11	Kepala Kejaksaan Negeri yang melaksanakan pengawasan lanjutan	Kaimana
12	Balai Pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan	Bapas Kelas II Fakkak

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAM RI
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Reynhard Silfonga
NIP. 67090332000001000



Surat Keputusan ini dapat divalidasi dengan cara scan QR Code pada samping kiri atau membuka <http://layanan.ditjenpas.go.id/layanan/integrasi/> kemudian masukan kode Barcode.



30e4587f08195cd13159c0175ea88898



PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

*Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec. Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669*

Lampiran 9

Bukti Temuan Korupsi Untung Tamsil
(Tidak Kami Tampilkan secara
keseluruhan, karena laporan terkait
Korupsi Untung Tamsil ini sekitar 300
Halaman)

PASTI INDONESIA

WWW.PASTIINDONESIA.ORG

Email : Seknas@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org

MENGAWASI & MEMBERDAYAKAN TURUN KE BAWAH

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten

Fakfak,



UNTUNG TAMSIL, S.Sos M.Si
NIP. 19770101 199712 1 001

Penyedia,
CV. PIPOS KREASI MANDIRI



SOFYAN TAMSIL
Direktur

Mengetahui :
Pengguna Anggaran
Dinas Perikanan Dan Kelautan
Kabupaten Fakfak,



UNTUNG TAMSIL, S.Sos M.Si
NIP. 19770101 199712 1 001

Paraf	
PPK	Penyedia

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum seluruhnya tersertifikasi PBJ

Sertifikat PBJ merupakan tanda bukti bahwa seseorang telah memahami Peraturan Perundang-Undangan di bidang PBJ. Sertifikat PBJ diberikan kepada seseorang yang telah mengikuti kegiatan sertifikasi PBJ yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Berdasarkan hasil reviu dokumen pengadaan dan wawancara dengan pelaku pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak yang terdiri dari Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pengadaan (PjPHP)/Panitia Penerima Hasil Pengadaan (PPHP) diketahui bahwa PPK/Pokja Pengadaan/Pejabat Pengadaan belum seluruhnya tersertifikasi PBJ untuk PPK. Pada

[REDACTED] Dinas Perikanan dan Kelautan untuk TA 2019 terdapat kegiatan PBJ dengan PPK belum tersertifikasi PBJ.

e. Pengadaan Perahu *Fiberglass* pada Dinas Perikanan dan Kelautan Senilai Rp46.062.396,77 Tidak Diketahui Keberadaannya

Pada TA 2019 Dinas Perikanan dan Kelautan menganggarkan belanja modal senilai Rp2.321.837.921,00 dan merealisasikan senilai Rp2.299.772.000,00 atau 99% dari anggaran, dari nilai tersebut diantaranya merupakan realisasi belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp1.257.982.000,00 atau 98% dari anggaran senilai Rp1.277.661.820,00.

Berdasarkan pemeriksaan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perikanan dan Kelautan serta *database* SIMDA keuangan, diketahui bahwa terdapat belanja modal pengadaan alat angkut apung bermotor berupa perahu *fiberglass* dan mesin jhonson 40 PK.

Pekerjaan Pengadaan Jhonson 40PK dan Perahu *fiberglass* dengan item pekerjaan yaitu 1 unit jhonson 40PK dan 1 unit perahu *fiberglass*, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV CO berdasarkan kontrak nomor 510.2/SPK.13.B.OTSUS/PPK-DPK-FF/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 senilai Rp108.500.000,00 yang diperuntukkan untuk sarana penunjang pengawasan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan pemeriksa bersama dengan bendahara barang, staf administrasi PPK dan kontraktor di gudang barang Dinas Perikanan dan Kelautan diketahui perahu *fiberglass* senilai Rp46.062.396,77 tidak



PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

*Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec, Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669*

Lampiran 10

Foto Untung Tamsil Hadir dalam Munas
Gerindra di Hambalang dan kemudian
menjadi Kader Gerindra

PASTI INDONESIA

WWW.PASTIINDONESIA.ORG

Email : Seknas@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org

MENGAWASI & MEMBERDAYAKAN TURUN KE BAWAH







embaranmedia.com

<https://embaranmedia.com> › gabun...



Gabung Ke Partai Gerindra, Untung Tamsil Ungkap Alasannya

20 Des 2021 —

Embaranmedia.com, Fakfak —
Untung Tamsil, S.Sos, M.Si yang
saat ini menjabat sebagai Bupati
Fakfak resmi bergabung ke
Partai ...





PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

*Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec. Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669*

Lampiran 11

kumpulan berita terkait korupsi
Untung Tamsil

PASTI INDONESIA

WWW.PASTIINDONESIA.ORG

Email : Seknas@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org

MENGAWASI & MEMBERDAYAKAN TURUN KE BAWAH

<https://www.tribunnews.com> > pold...



Polda Papua Barat Telusuri Kasus Dugaan Korupsi Bupati Fakfak ...

2 Jun 2021 – TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Papua Barat menelusuri dugaan tindak pidana...



channel9.id

<https://channel9.id> > Hukum



Polda Papua Barat Telusuri Dugaan Korupsi Bupati Fakfak Untung ...

2 Jun 2021 – Polda Papua Barat menelusuri dugaan tindak pidana korupsi dilakukan Bupati Fakfak, Untung Tamsil. Untung diduga korupsi saat...



jpnn.com

<https://www.jpnn.com> > daerah



Bupati Untung Tamsil Diperiksa Polisi, Apa Kasusnya? - JPNN.com

1 Jun 2021 – jpnn.com, MANOKWARI - Tim penyidik tindak pidana korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat telah ...

Terkait Dugaan Korupsi, Bupati Fakkak Untung Tamsil Diperiksa Polisi

Webmajalahfakta
2 Juni 2021

282 views



Majalahfakta.id – Terkait dugaan korupsi, Bupati Fakkak Untung Ismail diperiksa Ditreskrimsus Polda Papua Barat setelah ada pengaduan masyarakat (Dumas), Senin (31/5/2021).

Bupati termuda yang baru menjalankan tugasnya sebulan lima hari ini dimintai keterangan penyidik tipikor di Mapolres Fakkak. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi membenarkan pemeriksaan mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakkak tersebut.

Kabid Humas Polda Papua Barat membenarkan ada pemeriksaan terhadap Bupati Fakkak.

Baca Juga : [Dugaan Kepala BPBD Sulbar Salahgunakan Anggaran Bencana, Ini Jawabannya](#)

“Itu semua didasarkan atas adanya Dumas terkait kegiatan di Dinas Perikanan Kabupaten Fakkak semasa menjabat Kadis. Sehingga penyidik Polri dalam hal ini Ditreskrimsus Polda Papua Barat menindak-lanjuti dengan melakukan penyelidikan,” jelas Kombes Pol. Adam Erwindi.

Namun Perwira Menengah Polda Papua Barat tersebut belum bisa menyampaikan secara luas terkait pengaduan masyarakat yang diduga berpotensi tindak pidana korupsi

“Kita tetap mengacu pada asas praduga tak bersalah..ini masih Dumas yang harus penyidik cari tau benar atau tidaknya pengaduan tersebut,” tutur mantan Wadireskrimsus Polda Sulawesi Utara. (ren/hms)

Bupati Fakkak

Dugaan Korupsi

majalahfakta.id papua

Untung Tamsil

Diduga Korupsi, Polda Papua Barat Periksa Bupati Fakfak Untung Tamsil

 Bogi Rianto

Selasa, 1 Juni 2021 - 22:39 WIB



Diduga Korupsi, Polda Papua Barat Periksa Bupati Fakfak Untung Tamsil (Foto :)

Tim penyidik tindak pidana korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat telah memanggil Bupati Fakfak, Untung Tamsil, untuk memberikan keterangan klarifikasi terkait pengaduan masyarakat yang melaporkan dirinya karena diduga terlibat korupsi di Dinas Perikanan Kabupaten Fakfak.

Untung Tamsil, Bupati Fakfak termuda yang baru menjalankan tugasnya satu bulan, telah dimintai keterangan oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mapolres Fakfak, Papua Barat. Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Kombes Adam Erwindi yang dikonfirmasi, Selasa (1/6/2021), membenarkan pemeriksaan atas Bupati yang juga mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Fakfak tersebut. Adam Erwindi mengatakan bahwa setelah dikonfirmasi ke Direktur Reskrimsus Polda Papua Barat Kombes Romylus Tamtelihat, pun membenarkan adanya pemeriksaan itu. "Itu semua didasarkan atas adanya pengaduan masyarakat terkait kegiatan di Dinas Perikanan Kabupaten Fakfak semasa Kadisnya (Kepala Dinas) adalah Saudara Untung Tamsil (Bupati terpilih)," katanya, dikutip dari Antara. Penyidik Polri dalam hal ini Ditreskrimsus Polda Papua Barat hanya menindaklanjuti pengaduan itu, dengan melakukan penyelidikan awal atau panggilan klarifikasi, kata Kabid Humas Polda Papua Barat itu pula. Namun, dia belum bisa menyampaikan secara luas terkait pengaduan masyarakat yang diduga berpotensi tindak pidana korupsi tersebut. "Kami tetap mengacu pada asas praduga tak bersalah, ini masih sebatas pengaduan masyarakat yang harus penyidik cari tahu benar atau tidaknya pengaduan tersebut," ujarnya.

Polisi Usut Dugaan Korupsi yang Menyeret Bupati Fakfak

Rahmatul Fajri | Nusantara



Ist/Twitter Untung Tamsil

Bupati Fakfak Untung Tamsil.

POLDA Papua Barat tengah menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Bupati Fakfak, Untung Tamsil, saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan.

Polisi telah memanggil Untung saat untuk mengklarifikasi adanya pengaduan dari masyarakat (dumas) terkait kasus tersebut.

"Masih panggilan undangan klarifikasi. Itu semua didasarkan atas adanya dumas terkait kegiatan di dinas perikanan Kabupaten Fakfak semasa Kadisnya adalah Untung Tamsil," kata Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Adam Erwindi saat dikonfirmasi, Rabu (2/6).

Adam mengatakan saat ini Untung masih berstatus sebagai terlapor. Ia menjelaskan saat ini kasus tersebut tengah digarap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat.

Meski demikian, Adam enggan merinci mengenai kasus yang menyeret Bupati terpilih Kabupaten Fakfak tersebut.

"Kami tetap mengacu pada asas praduga tak bersalah. Ini masih dumas, yang harus penyidik cari tahu benar atau tidaknya pengaduan tersebut," pungkasnya. (Faj/OL-09)



PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

**Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec. Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669**

Lampiran 12

Surat Penyelidikan POLDA Papua Barat dan Kejaksaan Negeri Fakfak

PASTI INDONESIA

WWW.PASTIINDONESIA.ORG

Email : Seknas@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org

MENGAWASI & MEMBERDAYAKAN TURUN KE BAWAH

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH PAPUA BARAT
 DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS



LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Terima : 05 2021
 Pukul : 10 - 40 WIT

Kepada : Yth. Dirreskrimsus Polda Papua Barat
 Nomor Agenda :
 Surat Dari : WARSKRIM POLRI
 Nomor Surat : 0/2021/W/RES-3-2/2021/keasstran
 Tanggal Surat : 29 April 2021
 Perihal : penghapusan pengaduan masyarakat

Kepada Yth.			
1	WADIRRESKRIMSUS	5	KASUBDIT I INDAGSI
2	KABAG WASSIDIK	6	KASUBDIT II PERBANKAN
3	KABAG BINOPSNAL	7	KASUBDIT III TIPIDKOR
4	KASUBBAG RENMIN	8	KASUBDIT IV TIPIDTER
		9	KASUBDIT V SIBER
		10	WASSIDIK
		11	BENDAHARA
		12	PEJABAT PPSPM
		13	KORWAS PPNS

ISI DISPOSISI

- ☒ Komor Atensi.
- ☒ wajib gelar pertemuan dulu ds sy.
- ☒ kita lakukan LITAK LITIKI tuntas
- ☒ sesuai arahan Dir Tipidkor Bareskrim.
- ☒ ter -

Ditandatangani

Kepada Yth.

ISI DISPOSISI



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT
KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK

Jln. Yos Sudarso No. 10, Fakfak – Papua Barat Kode Pos : 98613
Telp. (0956) 211305, Email : kejaksaanfakfak@gmail.com

"Untuk Keadilan"

Pidsus-3A

Nomor : R- 635 /R.2.12/Fs/05/2021
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan tindak lanjut atas Laporan / Pengaduan setelah dilakukan penelitian.

Fakfak, 18 Mei 2021

Yth.
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat

Di-
Manokwari

Menindaklanjuti surat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat Nomor : R-120/R.2.5/Fd.1/05/2021, tanggal 07 Mei 2021 perihal Penerus Laporan Pengaduan, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian atas laporan pengaduan Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) PASTI Indonesia dapat ditindaklanjuti karena materi laporan pengaduan ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi dan ditindaklanjuti dengan dilakukannya Penyelidikan, sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor : Print-02/R.2.12/Fd/05/2021 tanggal 18 Mei 2021.

Demikian untuk maklum.

Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak


Anton Abdullah, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19780614 200501 1 009

Tembusan :

1. Yth. Inspektur II pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia; (Sebagai Laporan)
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
3. Yth. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
5. Arsip.





PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

*Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec. Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669*

Lampiran 13

Pose Untung Tamsil dengan Bapak
Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra

PASTI INDONESIA

WWW.PASTIINDONESIA.ORG

Email : Seknas@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org

MENGAWASI & MEMBERDAYAKAN TURUN KE BAWAH





PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec. Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669

Lampiran 14

Berita terkait terpilihnya Mohamad Lakotani sebagai KaKwarda Gerakan Pramuka Papua Barat

PASTI INDONESIA

WWW.PASTIINDONESIA.ORG

Email : Seknas@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org

MENGAWASI & MEMBERDAYAKAN TURUN KE BAWAH

Terpilih Ketua Pramuka PB, Lakotani Minta Pengurus Gerak Cepat

🕒 DEC 7, 2017



Pengurus Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Papua Barat periode 2017-2022 harus bisa



PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec. Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669

Lampiran 15

Informasi terkait status Warga Binaan
Pemasyarakatan Wim Fimbay

NO	NAMA WBP	NO REG	LAMA PIDANA	EKSPIRASI
1	TONI FATIMA DJIU BIN NN	BI-04/2016	6 thn	21-12-2022/ 21-12-2022
2	WILLIAMS ANTHONI TOREY, S.SOS., MPA BIN YULIANUS TOREY	BI- 101/2018	3 thn	08-11-2020 / 06-07-2021
3	CORNELES FENETRUMA	BI-56/2017	4 thn	17-11-2020 / 17-12-2020
4	MISWANUDDIN ATMANTO, BE BIN SUPARTO (ALM)	BI-81/2017		28-09-2020/ 26-01-2021
5	Drs. FRANS W. W. FIMBAY, M.M BIN FIMBAY	BI-09/2016	5 thn	26-04-2021/ 21-04-2022
6	ZAINAL ABIDIN BIN ZAKARI	BIII- 03/2020	4 thn	15-07-2020 2020 (PB)
7	SAFARUDDIN SELE BIN SELE	BIII- 01/2020	4 thn	27-07-2020/ 27-07-2020
8	NOLDI RAIMOND RAHAMIS, SE BIN ARMONIUS MUKADIL (ALM)	BI-85/2018	6 thn	11-04-2023/ 09-08-2023



PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

*Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec. Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669*

Lampiran 16

Foto Pelantikan di Istana Negara

PASTI INDONESIA

WWW.PASTIINDONESIA.ORG

Email : Seknas@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org

MENGAWASI & MEMBERDAYAKAN TURUN KE BAWAH





NO	NAMA WBP	NO REG	LAMA PIDANA	EKSPIRASI
----	----------	--------	----------------	-----------

5	Drs. FRANS W. W. FIMBAY, M.M BIN FIMBAY	BL-09/2016	5 thn	26-04-2021/ 21-04-2022
---	---	------------	-------	---------------------------



PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

*Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec. Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669*

Lampiran 17

Berita terkait terpilihnya Drs Wim F Fimbay
MM sebagai KaKwarcab Kabupaten
Teluk Bintuni

PASTI INDONESIA

WWW.PASTIINDONESIA.ORG

Email : Seknas@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org

MENGAWASI & MEMBERDAYAKAN TURUN KE BAWAH



Ketua Pramuka Teluk Bintuni, Drs Wim F Fimbay MM.

Drs Wim F Fimbay MM terpilih sebagai Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka 3309 Teluk Bintuni 2019-2024.



PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

*Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec. Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669*

Lampiran 18
**Tanda Terima Pelaporan Penipuan
Terhadap Presiden**

PASTI INDONESIA

WWW.PASTIINDONESIA.ORG

Email : Seknas@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org

MENGAWASI & MEMBERDAYAKAN TURUN KE BAWAH

TANDA - TERIMA

Macam yang diterima :

NO: 001 / Pengaduan / Presiden / Seknas - PASTINDO / PB / 11 / 2023

Perihal: Pengaduan & Penghinaan terhadap Presiden

Dari: PASTI INDONESIA

Kepada: KAPOLRI

Diterima tanggal : 7-2-2023

Pukul :

Catatan :

Diterima Oleh :

Nama :

Denis

Pangkat :

Kesatuan :

Tanda tangan



021-7210001



PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec. Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669

Lampiran 19

Foto Kehadiran Drs Wim F Fimbay MM,
Surat Mandat yang di tanda-tangani
sendiri, serta Putusan Hukum kasus lain
Drs Wim F Fimbay MM

PASTI INDONESIA

WWW.PASTIINDONESIA.ORG

Email : Seknas@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org

MENGAWASI & MEMBERDAYAKAN TURUN KE BAWAH



Keterangan Foto: Kaka Wiem Fymbay Nomor urut dua dari kanan.



Keterangan Foto : Kaka Wiem Fymbay duduk di Meja Presidium Paling Kiri



PUTUSAN
Nomor 2/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksakan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
Tempat Lahir : Temihabuan;
Umur / Tgl Lahir : 58 tahun / 08 April 1959;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gaya Baru Rt. 003 Rw. 004 Kel. Bintuni Barat
Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni
Provinsi Papua Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pendidikan : S2;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (KPA/PPK/PPTK);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan, karena Terdakwa masih menjalani hukuman di Rutan Bintuni;

Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Suwito,S.H.,M.H. dan H.Abdulrahman Upara,S.H.,M.H. Keduanya Advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum "SUWITO & PARTNERS" beralamat di Jalan. Nuri No. 03 Skyline Residence Kotaraja Jayapura. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 160/Leg.SK/HK07/2020/PNMnk tertanggal 31 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 2/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim Majelis;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 2/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PID.Sus-TPK/2020/PT JAP tanggal 18 Maret 2021 tentang Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari Putusan Nomor 2/Pid Sus-TPK/2021/PT JAP

Ditakarir

Pencemburan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi kesalahan teknis akibat sistem otomatis dari ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan dari sistem teknologi. Dalam hal Anda menemukan kecurian atau informasi yang bertentangan dengan informasi yang benar, mohon kirimkan kepada: Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui: Email: hapankeras@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (x.4.318)

Halaman 1



Keterangan Foto: Kaka Wiem Fymbay Nomor urut dua dari kanan.



Keterangan Foto : Kaka Wiem Fymbay duduk di Meja Presidium Paling Kiri

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
 Nomor 2/ PID.SUS-TPK /2021/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksadan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap	:	FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
Tempat Lahir	:	Teminabuan;
Umur / Tgl Lahir	:	58 tahun / 08 April 1959;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Gaya Baru Rt. 003 Rw. 004 Kel. Bintuni Barat Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pendidikan	:	S2;
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (KPA/PPK/PPTK);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan, karena Terdakwa masih menjalani hukuman di Rutan Bintuni ;



PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

*Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec. Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669*

Lampiran 20

Surat Keberatan terhadap hasil MUSDA Gerakan Pramuka Papua Barat 2022 yang SAH.

(Yang digerakan oleh Mohamad Lakotani, dengan menggunakan Jabatannya selaku Ketua DPD Gerindra Papua Barat)

PASTI INDONESIA

WWW.PASTIINDONESIA.ORG

Email : Seknas@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org

MENGAWASI & MEMBERDAYAKAN TURUN KE BAWAH



GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG 3302 KABUPATEN SORONG

Alamat: Jalan Sandiwon Airmas Kabupaten Sorong Papua Barat Kode Pos 98418



Kaimana, 06 Desember 2022

Nomor : 036/3302-A
Klasifikasi : Penting
Lampiran : -
Perihal : Keberatan dan Penolakan terhadap Hasil Pemilihan
Ketua Kwarda Papua Barat Periode 2022 – 2027

Kepada Yth.

KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

di-

Jakarta

Salam Pramuka

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Musyawarah Daerah (MUSDA) IV Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Papua Barat tanggal 29-30 November 2022 di Pusdiklatda Papua Barat maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agenda Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat dilaksanakan dalam 4 Sidang Paripurna yang dipimpin oleh 5 orang Presidium Sidang yang di pilih dari utusan kwartir cabang dan kwartir daerah.
2. Sidang Paripurna I dan II dapat berjalan dengan baik, namun ketika memasuki Sidang Paripurna III yang menjadwalkan pemilihan Ketua Kwarda periode 2022 – 2027 pada awalnya berjalan dengan baik, namun terjadi perdebatan dan kericuhan mengenai hak memilih kwarcab Fakfak yang hendak digunakan oleh ketua Kwarcab namun dihalangi oleh pengurus kawrcab sehingga ketua kwarcab fakfak mengambil sikap meninggalkan ruang sidang (*walk out*) dan hak memilihnya diambil alih oleh pengurus kwarcab lainnya.
3. Mekanisme pemilihan dilakukan dengan cara voting dengan perolehan suara kak Mohamad Lakotani sebanyak 6 suara dan kak Lazarus Indouw sebanyak 6 suara dari total 12 suara sah. Kondisi ini menyebabkan *deadlock* yang mana keputusannya hendak dikonsultasikan dan diserahkan kepada Kamabida, namun terjadi kericuhan yang ditimbulkan oleh beberapa kwarcab yang pro kepada kak Lazarus Indouw yang menolak hal tersebut dan menuntut untuk pengambilan keputusan dilakukan pada saat itu juga dan diserahkan kepada kak Editha Rehadad yang dianggap dapat mewakili unsur Mabida yang bila ditelusuri telah berakhir masa baktinya.

4. Keriuhan yang terjadi menyebabkan 2 anggota presidium sidang, 5 utusan Kwartir Cabang meninggalkan sidang (*walk out*) dan 1 anggota presidium sidang menyatakan abstain dan sidang dilanjutkan dengan dipimpin oleh 2 orang anggota presidium sidang dan hanya dihadiri oleh 6 utusan Kwarda.
5. Kamabida mengutus Saf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan dan SDM untuk memberikan arahan namun tidak diberi kesempatan dan keputusan diambil oleh kak Editha Rahaded yang merasa masih sebagai unsur Mabida yang berwenang memutuskan kak Lazarus Indouw sebagai Ketua Kwarda Papua Barat masa bakti 2022-2027.

Mengacu pada kelima hal tersebut di atas, Kwartir Cabang 3302 Kabupaten Sorong berpendapat bahwa:

- a. Pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat dalam Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat tidak dilakukan secara demokratis sepanjang yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar BAB V pasal 32 ayat (2) "kepengurusan Kwartir Cabang, Daerah dan Nasional dipilih oleh pengurus kwartir di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah Kwartir".
- b. Kwartir Cabang 3302 Kabupaten Sorong menyatakan keberatan dan menolak hasil pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2022-2027 serta meminta untuk dilakukan pemilihan ulang secara demokratis yang diawasi oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kwartir Cabang 3302 Kabupaten Sorong
Ketua,

MUSA LASARUS MALAGAM, S.Sos, M.Si
GERAKAN PRAMUKA
SORONG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua Barat selaku Kamabida;
2. Bupati Sorong selaku Kamabicab;
3. Para Ka. Kawarcab se- Kwarda Papua Barat;
4. Arsip;

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG 3301 FAKFAK
SANGGAR BAKTI PRAMUKA

Jl. Cenderawasih Kelurahan Fakfak Utara - Fakfak Kode Pos 98612

Email: gerakanpramukakwarcabfakfak@gmail.com



Fakfak, 05 Desember 2022

Nomor : 032/3301-A
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Keberatan dan Penolakan terhadap Hasil Pemilihan
Ketua Kwarda Papua Barat Periode 2022 – 2027**

Kepada Yth.

KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

di-

Jakarta

Salam Pramuka

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Musyarawah Daerah (MUSDA) IV Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Papua Barat tanggal 29-30 November 2022 di Pusdiklatda Papua Barat maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

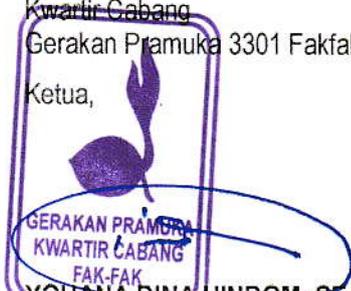
1. Agenda Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat dilaksanakan dalam 4 Sidang Paripurna yang dipimpin oleh 5 orang Presidium Sidang yang di pilih dari utusan kwartir cabang dan kwartir daerah.
2. Sidang Paripurna I dan II dapat berjalan dengan baik, namun ketika memasuki Sidang Paripurna III yang menjadwalkan pemilihan Ketua Kwarda periode 2022 – 2027 pada awalnya berjalan dengan baik, namun terjadi perdebatan dan kericuhan mengenai hak memilih kwarcab Fakfak yang hendak digunakan oleh kami selaku Ketua Kwarda 3301 Fakfak, namun dihalangi oleh pengurus kawrcab, bahkan dipermalukan didalam ruangan sidang, kami selaku Ka Kwarda, tetapi juga adalah Wakil Bupati Fakfak merasa terhina dan malu sehingga kami mengambil sikap meninggalkan ruang sidang (*walk out*) dan hak suara kami diambil alih oleh pengurus kwarcab lainnya tanpa persetujuan dari kami selaku Ka Kwarda 3301 Fakfak.
3. Mekanisme pemilihan dilakukan dengan cara voting dengan perolehan suara kak Mohamad Lakotani sebanyak 6 suara dan kak Lazarus Indouw sebanyak 6 suara dari total 12 suara sah. Kondisi ini menyebabkan *deadlock* yang mana keputusannya hendak dikonsultasikan dan diserahkan kepada Kamabida, namun terjadi kericuhan yang ditimbulkan oleh beberapa kwarcab yang pro kepada kak Lazarus Indouw yang menolak hal tersebut dan menuntut untuk pengambilan keputusan dilakukan pada saat itu juga dan diserahkan kepada kak Editha Rehadad yang dianggap dapat mewakili unsur Mabida yang bila ditelusuri telah berakhir masa baktinya.

4. Kericuhan yang terjadi menyebabkan 2 anggota presidium sidang, 5 utusan Kwartir Cabang meninggalkan sidang (*walk out*) dan 1 anggota presidium sidang menyatakan abstain dan sidang dilanjutkan dengan dipimpin oleh 2 orang anggota presidium sidang dan hanya dihadiri oleh 6 utusan Kwardcab.
5. Kamabida mengutus Saf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan dan SDM untuk memberikan arahan namun tidak diberi kesempatan dan keputusan diambil oleh kak Editha Rahaded yang merasa masih sebagai unsur Mabida yang berwenang memutuskan kak Lazarus Indouw sebagai Ketua Kwarda Papua Barat masa bakti 2022-2027.

Mengacu pada kelima hal tersebut di atas, Kwartir Cabang 3301 Fakfak berpendapat bahwa:

- a. Pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat dalam Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat tidak dilakukan secara demokratis sepanjang yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar BAB V pasal 32 ayat (2) "kepengurusan Kwartir Cabang, Daerah dan Nasional dipilih oleh pengurus kwartir di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah Kwartir".
- b. Kwartir Cabang 3301 Fakfak menyatakan keberatan dan menolak hasil pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2022-2027 serta meminta untuk dilakukan pemilihan ulang secara demokratis yang diawasi oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kwartir Cabang
Gerakan Pramuka 3301 Fakfak
Ketua,

YOHANA DINA HINDOM, SE, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua Barat selaku Kamabida;
2. Bupati Fakfak selaku Kamabicab;
3. Para Ka. Kawarcab se- Kwarda Papua Barat;
4. Arsip;



Sorong, 5 Desember 2022

Nomor : /3304-A
Klasifikasi : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Keberatan /Penolakan terhadap Hasil Pemilihan
Ketua Kwarda Papua Barat Periode 2022 – 2027**

Kepada Yth.

KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

Di -

Jakarta

Salam Pramuka

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Musyarawarh Daerah (MUSDA) IV Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Papua Barat tanggal 29-30 November 2022 di Pusdiklatda Papua Barat maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agenda Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat dilaksanakan dalam 4 Sidang Paripurna yang dipimpin oleh 5 orang Presidium Sidang yang di pilih dari utusan kwartir cabang dan kwartir daerah.
2. Sidang Paripurna I dan II dapat berjalan dengan baik, namun ketika memasuki Sidang Paripurna III yang menjadwalkan pemilihan Ketua Kwarda periode 2022 – 2027 pada awalnya berjalan dengan baik, namun terjadi perdebatan dan kericuhan mengenai hak memilih kwarcab Fakfak yang hendak digunakan oleh ketua Kwarcab namun dihalangi oleh pengurus kawrcab sehingga ketua kwarcab fakfak mengambil sikap meninggalkan ruang sidang (*walk out*) dan hak memilihnya diambil alih oleh pengurus kwarcab lainnya.
3. Mekanisme pemilhan dilakukan dengan cara voting dengan perolehan suara kak Mohamad Lakotani sebanyak 6 suara dan kak Lazarus Indouw sebanyak 6 suara dari total 12 suara sah. Kondisi ini menyebabkan *deadlock* yang mana keputusannya hendak dikonsultasikan dan diserahkan kepada Kamabida, namun terjadi kericuhan yang ditimbulkan oleh beberapa kwarcab yang pro kepada kak Lazarus Indouw yang menolak hal tersebut dan menuntut untuk pengambilan keputusan dilakukan pada saat itu juga dan diserahkan kepada kak Editha Rehadad yang dianggap dapat mewakili unsur Mabida yang bila ditelusuri telah berakhir masa baktinya.
4. Kericuhan yang terjadi menyebabkan 2 anggota presidium sidang, 5 utusan kwartir cabang meninggalkan sidang (*walk out*) dan 1 anggota presidium sidang menyatakan abstain dan sidang dilanjutkan dengan dipimpin oleh 2 orang anggota presidium sidang dan hanya dihadiri oleh 6 utusan kwarcab.

5. Kamabida mengutus staf ahli bidang pendidikan dan SDM untuk memberikan arahan namun tidak diberi kesempatan dan keputusan diambil oleh kak Editha Rahadad yang merasa masih sebagai unsur Mabida yang berwenang memutuskan kak Lazarus Indouw sebagai Ketua Kwarda Papua Barat masa bakti 2022-2027.
6. Andalan Cabang dan DKC Kwardcab Kota Sorong yang hadir mengikuti Musppanitera dan Musda IV Kwarda Papua Barat Tahun 2022, Tindak mendapat Surat Mandat resmi dari kami selaku KetuaKwartir Cabang Kota Sorong,

Mengacu pada keenam hal tersebut di atas, Kwartir Cabang Kota Sorong berpendapat bahwa:

- a. Pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat dalam Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat tidak dilakukan secara demokratis sepanjang yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar BAB V pasal 32 ayat (2) "kepengurusan Kwartir Cabang, Daerah dan Nasional dipilih oleh pengurus kwartir di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir".
- b. Kwartir Cabang Kota Sorong menyatakan keberatan dan menolak hasil pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2022-2027 serta meminta untuk dilakukan pemilihan ulang secara demokratis yang diawasi oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kwartir Cabang
Gerakan Pramuka Kota Sorong

Ketua,



PETRONELA KAMBUAYA, S.Pd, M.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua Barat selaku Kamabida;
2. Wali Kota Sorong selaku Kamabicab;
3. Para Ka. Kawarcab se- Kwarda Papua Barat;
4. Arsip;



GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG 3306 KAIMANA

Alamat: Jalan Utarum (Stadion Triton) Banteme, Kode Pos 98654



Kaimana, 06 Desember 2022

Nomor : **028** /3306-A
Klasifikasi : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Keberatan dan Penolakan terhadap Hasil Pemilihan
Ketua Kwarda Papua Barat Periode 2022 – 2027**

Kepada Yth.

KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

di-

Jakarta

Salam Pramuka

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Musyarawah Daerah (MUSDA) IV Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Papua Barat tanggal 29-30 November 2022 di Pusdiklatda Papua Barat maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agenda Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat dilaksanakan dalam 4 Sidang Paripurna yang dipimpin oleh 5 orang Presidium Sidang yang di pilih dari utusan kwartir cabang dan kwartir daerah.
2. Sidang Paripurna I dan II dapat berjalan dengan baik, namun ketika memasuki Sidang Paripurna III yang menjadwalkan pemilihan Ketua Kwarda periode 2022 – 2027 pada awalnya berjalan dengan baik, namun terjadi perdebatan dan kericuhan mengenai hak memilih kwarcab Fakfak yang hendak digunakan oleh ketua Kwarcab namun dihalangi oleh pengurus kawrcab sehingga ketua kwarcab fakfak mengambil sikap meninggalkan ruang sidang (*walk out*) dan hak memilihnya diambil alih oleh pengurus kwarcab lainnya.
3. Mekanisme pemilihan dilakukan dengan cara voting dengan perolehan suara kak Mohamad Lakotani sebanyak 6 suara dan kak Lazarus Indouw sebanyak 6 suara dari total 12 suara sah. Kondisi ini menyebabkan *deadlock* yang mana keputusannya hendak dikonsultasikan dan diserahkan kepada Kamabida, namun terjadi kericuhan yang ditimbulkan oleh beberapa kwarcab yang pro kepada kak Lazarus Indouw yang menolak hal tersebut dan menuntut untuk pengambilan keputusan dilakukan pada saat itu juga dan diserahkan kepada kak Editha Rehadad yang dianggap dapat mewakili unsur Mabida yang bila ditelusuri telah berakhir masa baktinya.

4. Kericuhan yang terjadi menyebabkan 2 anggota presidium sidang, 5 utusan Kwartir Cabang meninggalkan sidang (*walk out*) dan 1 anggota presidium sidang menyatakan abstain dan sidang dilanjutkan dengan dipimpin oleh 2 orang anggota presidium sidang dan hanya dihadiri oleh 6 utusan Kwarcab.
5. Kamabida mengutus Saf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan dan SDM untuk memberikan arahan namun tidak diberi kesempatan dan keputusan diambil oleh kak Editha Rahaded yang merasa masih sebagai unsur Mabida yang berwenang memutuskan kak Lazarus Indouw sebagai Ketua Kwarda Papua Barat masa bakti 2022-2027.

Mengacu pada kelima hal tersebut di atas, Kwartir Cabang 3306 Kaimana berpendapat bahwa:

- a. Pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat dalam Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat tidak dilakukan secara demokratis sepanjang yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar BAB V pasal 32 ayat (2) "kepengurusan Kwartir Cabang, Daerah dan Nasional dipilih oleh pengurus kwartir di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah Kwartir".
- b. Kwartir Cabang 3306 Kaimana menyatakan keberatan dan menolak hasil pemilihan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bakti 2022-2027 serta meminta untuk dilakukan pemilihan ulang secara demokratis yang diawasi oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kwartir Cabang
Gerakan Pramuka 3306 Kaimana
Ketua,

HASBULA FURUADA, S.IP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Papua Barat selaku Kamabida;
2. Bupati Kaimana selaku Kamabicab;
3. Para Ka. Kwarcab se- Kwarda Papua Barat;
4. Arsip;



GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG 3305 TELUK WONDAMA

Jl. Raya Wasior Rasiei Perumahan Pemda Manggurai - Kode Pos : 98362
kwarcabtelukwondama@gmail.com



Rasiei, 05 Desember 2022

Nomor : 020/3305-A
Klasifikasi : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Keberatan dan Penolakan terhadap Hasil Pemilihan
Ketua Kwarda Papua Barat Periode 2022 – 2027**

Kepada Yth.

KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

di-

Jakarta

Salam Pramuka

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Musyarawarh Daerah (MUSDA) IV Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Papua Barat tanggal 29-30 November 2022 di Pusdiklatda Papua Barat maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agenda Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat dilaksanakan dalam 4 Sidang Paripurna yang dipimpin oleh 5 orang Presidium Sidang yang di pilih dari utusan kwartir cabang dan kwartir daerah.
2. Sidang Paripurna I dan II dapat berjalan dengan baik, namun ketika memasuki Sidang Paripurna III yang menjadwalkan pemilihan Ketua Kwarda periode 2022 – 2027 pada awalnya berjalan dengan baik, namun terjadi perdebatan dan kericuhan mengenai hak memilih kwarcab Fakfak yang hendak digunakan oleh ketua Kwarda namun dihalangi oleh pengurus kawrcab sehingga ketua kwarcab fakfak mengambil sikap meninggalkan ruang sidang (*walk out*) dan hak memilihnya diambil alih oleh pengurus kwarcab lainnya.
3. Mekanisme pemilhan dilakukan dengan cara voting dengan perolehan suara kak Mohamad Lakotani sebanyak 6 suara dan kak Lazarus Indouw sebanyak 6 suara dari total 12 suara sah. Kondisi ini menyebabkan *deadlock* yang mana keputusannya hendak dikonsultasikan dan diserahkan kepada Kamabida, namun terjadi kericurahan yang ditimbulkan oleh beberapa kwarcab yang pro kepada kak Lazarus Indouw yang menolak hal tersebut dan menuntut untuk pengambilan keputusan dilakukan pada saat itu juga dan diserahkan kepada kak Editha Rehadad yang dianggap dapat mewakili unsur Mabida yang bila ditelusuri telah berakhir masa baktinya.

4. Kericuhan yang terjadi menyebabkan 2 anggota presidium sidang, 5 utusan Kwartir Cabang meninggalkan sidang (*walk out*) dan 1 anggota presidium sidang menyatakan abstain dan sidang dilanjutkan dengan dipimpin oleh 2 orang anggota presidium sidang dan hanya dihadiri oleh 6 utusan Kwardcab.
5. Kamabida mengutus Saf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan dan SDM untuk memberikan arahan namun tidak diberi kesempatan dan keputusan diambil oleh kak Editha Rahaded yang merasa masih sebagai unsur Mabida yang berwenang memutuskan kak Lazarus Indouw sebagai Ketua Kwarda Papua Barat masa bakti 2022-2027.

Mengacu pada kelima hal tersebut di atas, Kwartir Cabang 3305 Teluk Wondama berpendapat bahwa:

- a. Pemilihan ketua kwarda Papua Barat dalam Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat tidak dilakukan secara demokratis sepanjang yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar BAB V pasal 32 ayat (2) "kepengurusan kwartir cabang, daerah dan nasional dipilih oleh pengurus kwartir di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir".
- b. Kwartir Cabang 3305 Teluk Wondama menyatakan keberatan dan menolak hasil pemilihan ketua kwartir daerah gerakan pramuka Papua Barat masa bakti 2022-2027 serta meminta untuk dilakukan pemilihan ulang secara demokratis yang diawasi oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kwartir Cabang
Gerakan Pramuka 3305 Teluk Wondama

Ketua,



ASER WAROY, S.Sos

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Papua Barat selaku Kamabida;
2. Bupati Teluk Wondama selaku Kamabicab;
3. Para Ka. Kawarcab se- Kwarda Papua Barat;
4. Arsip;



GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR DAERAH PAPUA BARAT
KWARTIR CABANG 3309 TELUK BINTUNI

Alamat : Kampung Bumi Saniari Sp.3 Jalur IX Distrik Manimeri Kab. Teluk Bintuni



Bintuni, 5 Desember 2022

Nomor : 42 - 3309 - A
Klasifikasi : Penting
Lampiran :
Perihal : **Keberatan/Penolakan Hasil Pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat Masa Bhakti 2022 - 2027**

Kepada Yth.
KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
Di -
Jakarta

Salam Pramuka

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Musyawarah Daerah (Musda IV) Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Papua Barat pada tanggal 29 - 20 November 2022 di Pusdiklat Papua Barat, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agenda Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat dilaksanakan dalam 4 sidang paripurna yang dipimpin oleh 5 (lima) orang presidium yang dipilih dari utusan Kwartir Cabang dan Kwartir Daerah;
2. Sidang Paripurna I dan II berjalan dengan baik, namun memasuki sidang paripurna III yang menjadwalkan pemilihan Ketua Kwarda masa bhakti 2022 - 2027, pada awalnya dapat berjalan dengan baik namun terjadi perdebatan dan keributan mengenai hak memilih Kwardcab Faktak yang hendak digunkan oleh Ketua Kwardcab namun dihalangi oleh pengurus Kwardcab sehingga Ketua Kwardcab Faktak mengambil sikap meninggalkan sidang (*walk out*) dan hak memilihnya diambil alih oleh pengurus kwardcabnya.
3. Mekanisme pemilihan dilakukan dengan cara *voting* dengan hasil perseoleh suara adalah : Kak Mohamad Lakotani (6 suara) dan kak Lazarus Indouw (6 suara) dari total 12 suara sah. Kondisi ini menyebabkan *deadlock* yang mana keputusannya hendak dikonsultasikan dan diserahkan kepada Kamabida, namun terjadi keributan yang ditimbulkan oleh beberapa Kwardcab yang *pro* kepada Kak Lazarus Indouw yang menolak keputusan tersebut dan menuntut agar keputusan ditentukan saat itu juga dan diserahkan kepada Kak Editha Rahadad yang dianggap dapat dapat mewakili unsur Mabida yang bila ditelusuri telah berakhir masa jabatannya.
4. Keributan yang terjadi menyebabkan 2 anggota presidium sidang, 5 utusan Kwartir Cabang meninggalkan sidang (*walk out*) dan 1 anggota presidium sidang menyatakan *abstain* dan sidang dilanjutkan dengan dipimpin oleh 2 orang anggota presidium sidang dan hanya dihadiri oleh 6 utusan Kwardcab.
5. Kamabida mengutus staf ahli bidang pendidikan dan SDM untuk memberikan arahan namun tidak diberikan kesempatan dan keputusan diambil oleh Kak Editha Rahadad yang merasa masih sebagai unsur Mabida yang berwenang, sehingga memutuskan Kak Lazarus Indouw sebagai Ketua Kwarda Papua Barat masa bhakti 2022 -2027.

Mengacu pada hal-hal tersebut diatas, Kwartir Cabang 3309 Teluk Bintuni berpendapat bahwa :

- a. Pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat dalam Musda IV Gerakan Pramuka Kwarda Papua Barat **tidak dilakukan secara demokratis** dan tidak sesuai dengan amanat Anggaran Dasar Bab V pasal 32 ayat (2) "*Kepengurusan kwartir cabang, daerah dan nasional dipilih oleh pengurus kwartir di wilayah secara demokratis melalui musyawarah kwartir*"
- b. Kwartir Cabang 3309 Teluk Bintuni menyatakan **keberatan dan menolak hasil pemilihan ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat masa bhakti 2022-2027** serta meminta untuk dilakukan pemilihan ulang secara demokratis yang diawasi oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasama Kakak disampaikan terima kasih.

Gerakan Pramuka :
Kwardcab 3309 Teluk Bintuni
Ketua

Drs. Frans W.W. Fyrbay, MM

Tembusan Kepada Yth :
Gubernur Papua Barat selaku Ka. Mabida Papua Barat di Manokwari;
Bupati Teluk Bintuni selaku Ka. Mabidcab Teluk Bintuni di Bintuni (sebagai laporan)

Nomor : --
Sifat : Penting/Segera
Perihal : **Penolakan Hasil Pemilihan Ketua Kwartir Daerah Papua Barat
Dan Permohonan Musda Luar Biasa**

Kepada Yth :

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Di -

Jakarta

Salam Pramuka,

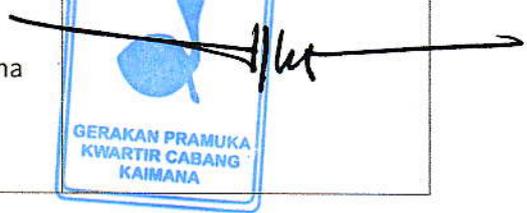
Menyikapi hasil Pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) IV Gerakan Pramuka Papua Barat Tahun 2022, tanggal, 29 s/d 30 November 2022 di Manokwari yang penuh Kecurangan, Pengabaian/Pembiaran, Cacat Hukum dan sarat Intervensi, maka bersama ini kami beberapa Kwartir Cabang Gerakan Pramuka di Papua Barat sebagaimana yang bertanda tangan, **menyatakan keberatan dan menolak hasil pemilihan Ketua Kwarda Papua Barat 2022-2027**, dengan alasan :

1. Bahwa sejak awal Persidangan, Presidium Pimpinan Sidang sudah berlaku tidak netral dan condong pada salah satu Calon Ketua Kwarda. Misalnya dengan memperlakukan kehadiran Ketua Kwardcab Fak-fak (Kakak Yohana Dina Hindom/Wakil Bupati Fakfak) pada Forum Musda dengan alasan karena telah menerbitkan mandate kepada yang lain, sehingga Ka Kwardcab Fakfak harus keluar dan meninggalkan Ruang Sidang;
2. Bahwa pada proses penghitungan hasil pemilihan yang menunjukkan hasil perolehan suara imbang (6 - 6), dan terjadi deadlock, presidium sidang secara sepihak, dengan sengaja memberikan ruang/kesempatan kepada Anggota Mabida yang sdh berakhir masa jabatannya dan tidak memiliki legal standing (Kakak Edita Rahadet) untuk ikut memilih, sehingga menguntungkan/memenangkan Calon Ka Kwarda yang mereka usung;
3. Bahwa dalam pelaksanaan Musda IV, Kwarda Papua Barat di supervisi oleh Waka Orgakum Kwarnas, (Kakak Sigit Muryanto), Akan tetapi saran Waka Orgakum untuk diserahkan pada Kamabida untuk memutuskan saat perolehan suara imbang dan atau melibatkan Mabida yang mendapatkan mandate dari Kamabida justru tidak di hiraukan oleh Presidium Pimpinan sidang;
4. Bahwa dalam Forum Musda IV Kwarda Papua Barat, Delegasi (Kwardcab Kota Sorong) hadir dengan Mandat yang bukan di tanda tangani oleh Ka Kwardcab Kota Sorong. Untuk hal ini telah diminta waktu guna mendengarkan penjelasan dari Supervisor (Waka Orgakum Kwarnas) namun tdk dihiraukan oleh Presidium Pimpinan Sidang. Sehingga dengan demikian menurut hemat Kami, keberadaan Delegasi Kota Sorong pada Forum Musda, adalah tidak sah, namun dengan sengaja di biarkan oleh Presidium Pimpinan Sidang;
5. Bahwa salah satu Calon Ka Kwarda, sebenarnya tidak memenuhi syarat, karena tidak dapat menunjukkan bukti keaktifannya pada 5 (lima) tahun terakhir dalam Gerakan Pramuka sebagaimana syarat pencalonan sesuai Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 83, ayat 7. Akan tetapi hal inipun, dengan cara cara yang lihai di tutupi oleh Presidium Sidang;
6. Selanjutnya kami sampaikan bahwa, dari 5 (lima) orang yang memimpin Presidium sidang, hanya 2 (dua) orang yang menandatangani keputusan Musda IV yang terkait dengan Pemilihan Ketua Kwartir Daerah Papua Barat 2022-2027;
7. Bahwa sesuai poin 1 s/d 6 tersebut diatas, Kami mengusulkan kepada Ka Kwarnas Gerakan Pramuka, untuk mengambil alih Kwarda Papua Barat dan selanjutnya melaksanakan Musda Luar Biasa dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan dihadiri langsung oleh para Ketua Kwardcab se-Papua Barat.

Demikian, surat Keberatan dan Penolakan ini kami sampaikan, untuk mendapat proses lebih lanjut. Atas perhatian dan sikap tegas Ka Kwarnas Gerakan Pramuka, untuk mengambil alih Kwarda Papua Barat dan selanjutnya melaksanakan Musda Luar Biasa, kami haturkan terimakasih.

Manokwari, 01 Desember 2022

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

NO.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan/Cap
01.	Drs. Frans W. W. Fimbay, MM	Ka Kwarcab Teluk Bintuni	
02.	Aser Waroy, S.Sos	Ka Kwarcab Teluk Wondama	
03.	Drs. Martinus Salamuk	Ka Kwarcab Sorong Selatan	
04.	Musa Lasarus Malagam, S.Sos, M.Si	Ka Kwarcab Sorong	
05.	Hasbulah Furuada, S.IP	Ka Kwarcab Kaimana	

06.	Petronela Kambuaya, S.Pd, M.Pd	Ka Kwarcab Kota Sorong	
07.	Yohana Dina Hindom, SE, MM	Ka Kwarcab Fakfak	
08.	Mohamad Lakotani, SH.,M.S i	Calon Ka Kwarda Masa Bakti 2022 - 2022	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Papua Barat selaku KAMABIDA Gerakan Pramuka;
2. Para Bupati Wali /Kota se- Papua Barat selaku KAMABICAB Gerakan Pramuka;
3. Para Ka Kwarcab Se-Kwarda Papua Barat;
4. Arsip;



PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

*Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya
Kec. Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669*

Lampiran 21

Laporan Keuangan Gerakan Pramuka
Papua Barat, Dekade 2017-2022 dengan
Mohamad Lakotani sebagai Ketua
Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat

&

Hasil Rekomendasi untuk Audit Internal,
setelah Laporan Pertanggung Jawaban
Mohamad Lakotani di tolak di Musda
Gerakan Pramuka Papua Barat 29
November 2022

PASTI INDONESIA

WWW.PASTIINDONESIA.ORG

Email : Seknas@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org

MENGAWASI & MEMBERDAYAKAN TURUN KE BAWAH

NERACA
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT
TAHUN 2018 S.D 2022

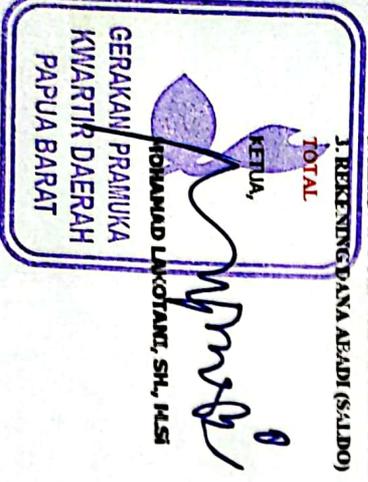
NO	TANGGAL	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1	31 JANUARI 2018	SALDO AWAL	Rp	1,648,385	-
2	09 MARET 2018	DANA HISA	Rp	5,000,000,000	-
3	17 DESEMBER 2018	DANA HISA	Rp	1,000,000,000	Rp 6,001,648,385
		SP2D NO. 487/SP2D-LS/BRKAD-PPKD-PR/2018		Rp 5,557,965,921	
		PENGELUARAN KEGIATAN TAHUN 2018			
		SALDO PER 31 DESEMBER 2018	Rp	443,682,464	
4	10 April 2019	DANA HISA	Rp	5,000,000,000	
		SP2D NO. 0151/SP2D-LS/BRKAD-PPKD-PR/2019			
5	05 DESEMBER 2019	DANA HISA	Rp	2,000,000,000	Rp 7,443,682,464
		SP2D NO. 3603/SP2D-LS/BRKAD-PPKD-PR/2019			
		PENGELUARAN KEGIATAN TAHUN 2019			
		SALDO PER 31 DESEMBER 2019	Rp	316,614,135	
6	13 FEBRUARI 2020	DANA HISA	Rp	6,000,000,000	
		SP2D NO. 0038/SP2D-LS/BRKAD-PPKD-PR/2020			
7	04 DESEMBER 2020	DANA HISA	Rp	3,000,000,000	Rp 9,316,614,135
		SP2D NO. 1414/SP2D-LS/BRKAD-PPKD-PR/2020			
		PENGELUARAN KEGIATAN TAHUN 2020			
		SALDO PER 31 DESEMBER 2020	Rp	175,710,767	
8	24 JUNI 2021	DANA HISA	Rp	4,000,000,000	Rp 4,175,710,767
		SP2D NO. 111/SP2D-LS/HIBAH/SETDA-KESRA-PB/2021			
		PENGELUARAN KEGIATAN TAHUN 2021			
		SALDO PER 31 DESEMBER 2021	Rp	173,785,242	
9	13 MEI 2022	DANA HISA	Rp	4,000,000,000	Rp 4,178,785,242
		SP2D NO. 0541/SP2D-LS/HIBAH-UANG/ROKESRA/SETDA-KESRA-PB 2022			
		PENGELUARAN KEGIATAN TAHUN 2022			
		SALDO PER NOVEMBER 2022 (KURANG ANGGARAN)	-Rp	243,710,085	

NOTE :

1. BEKENCING HIBAH (SALDO) : Rp
2. BEKENCING PENGELUARAN PUSDIK (SALDO) : Rp
3. BEKENCING DANA ALADI (SALDO) : Rp
- TOTAL** : Rp

13,177,028
102,000,000
200,000,000
315,177,028

-Rp 30,001,648,385 Rp 30,245,358,170
-Rp 243,710,085



BENDAHUWA
[Signature]
HELEN PRINDA-DEWIT, SHIK., M.Si

No. : 005/LPK-PB/2020

Hal : Rekomendasi Internal Audit

Kepada Yth.

Musyawarah Daerah Kwarda Papua Barat
di Manokwari

Bersama ini kami sampaikan rekomendasi-rekomendasi atas aktivitas pemeriksaan Keuangan dan Aset Kwartir daerah Papua Barat periedo 2017 – 2022. Selama melakukan internal audit, kami melihat dan menghitung berdasarkan kwitansi atau bukti – bukti pengeluaran uang semuanya ada. Tapi dalam perhitungan ada jumlah yang tidak seimbang. Disebabkan dalam perhitungan manual dan Berkas – berkas yang kami minta belum lengkap. Dan waktu yang begitu singkat sehingga pemeriksaan kami tidak maksimal.

Dan berikut ini kami sampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan internal audit:

1. Melakukan pencatatan Jurnal harus dilakukan dengan akurat dan konsisten agar tidak menjadi selisih perhitungan.
2. Pencatatan Keuangan Kwarda hanya menggunakan BKU, dan menghitung bukti bukti Pengeluaran. Sehingga terdapat salah penjumlah. Dan harap dapat menggunakan Aplikasi keuangan yang benar
3. Melakukan Jurnal Keuangan harus menggunakan manual dan menggunakan komputerisasi sehingga penjumlahnya dapat akurat
4. Pencatatan Bukti pada BKU harus dilakukan secara teliti dan benar, sehingga pelaporan keuangan dapat tercapai keakuratnya.
5. Melengkapi buku check list fixed asset sesuai dengan fisik barang yang ada di masing-masing ruangan dan dicocokkan dengan daftar fixed asset dari Accounting.
6. Standarisasi label dan nama barang agar label dan nama yang dicatat sama (sudah standar) sehingga memudahkan dalam inventarisasi fixed asset.

Demikian laporan kami.atas perhatiannya disampaikan Terima Kasih

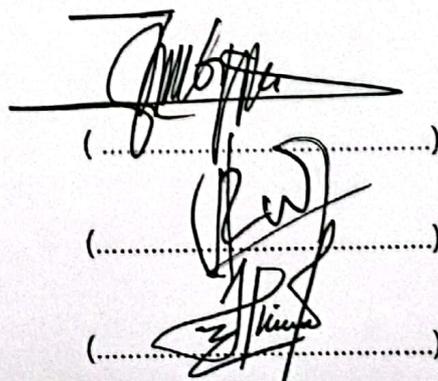
Manokwari, 29 November 2022

Lembaga Pemeriksa Keuangan

1. Baldus Paiki

2. Andreas Gerson Rumbekwan

3. Sri Mulat



(.....)

(.....)

(.....)



PASTI INDONESIA

(PERHIMPUNAN PERSATUAN AKSI SOLIDARITAS UNTUK TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI INDONESIA)

*Sekretariat : Duta Indah Residence, Cluster Beryl Blok B9 No.02, Lantai II, Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang jaya
Kec. Periuk, Kota Tangerang, 15132, Banten – Indonesia. Phone : (+62)813.5.9999.505 | (+62)813.5999.9669*

Lampiran 22

Foto Korban Penipuan dan

Foto Korban Penipuan saat berencana
maju dalam Pilkada Kabupaten Fakfak
2020

PASTI INDONESIA

WWW.PASTIINDONESIA.ORG

Email : Seknas@pastiindonesia.org | Lapor@pastiindonesia.org

MENGAWASI & MEMBERDAYAKAN TURUN KE BAWAH



PASANGAN INDEPENDEN



Drs. Ec. Sulaeman Uswanas, M.Si
(Pace Nanang)

Hermanus Kerryanto
(Ongko Itjong)

Selamat Datang Harapan dan Tahun Baru 2020

*"Jangan Selalu Membenarkan Kebiasaan
Tetapi Marilah Kita Sama-Sama Membiasakan Kebenaran"*



Lampiran 23

Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ali Hamdan Bogra, S.I.P., M.Si. pada saat pertemuan diskusi terkait Papua Barat bersama Direktur PASTI Indonesia.

Menyampaikan kegelisahannya melihat Kondisi Gerindra di Papua Barat, sebelum memutuskan mundur dari Gerindra Papua Barat.

